



**ANALISIS PERHITUNGAN TARIF BIAYA
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
DAN IMPLIKASINYA TERHADAP
PENDAPATAN SPP SEKOLAH
(Studi Kasus Pada SMK Swasta Tarbiyah Islamiyah
Hampanan Perak)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Ujian
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Pada Fakultas Sosial Sains
Universitas Pembangunan Panca Budi

Oleh:

FITRIA
NPM : 1515100019

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN
2019**



**FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN**

PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : FITRIA
NPM : 1515100019
PROGRAM STUDI : AKUNTANSI
JENJANG : S1 (STRATA SATU)
JUDUL : ANALISIS PERHITUNGAN TARIF BIAYA
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN
IMPLIKASINYA TERHADAP PENDAPATAN
SPP SEKOLAH (STUDI KASUS PADA SMK
SWASTA TARBIYAH ISLAMIYAH
HAMPARAN PERAK)

Medan, Oktober 2019

KETUA PROGRAM STUDI

(Junawan, S.E., M.Si)

DEKAN



(Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum)

PEMBIMBING I

(Pipit Buana Sari, S.E., M.M)

PEMBIMBING II

(Hasrul Azwar Hasibuan, S.E., M.M)



**FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN**

**SKRIPSI DITERIMA DAN DISETUJUI OLEH PANITIA UJIAN SARJANA
LENGKAP FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
PERSETUJUAN UJIAN**

NAMA : FITRIA
NPM : 1515100019
PROGRAM STUDI : AKUNTANSI
JENJANG : S1 (STRATA SATU)
JUDUL : ANALISIS PERHITUNGAN TARIF BIAYA
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN
IMPLIKASINYA TERHADAP PENDAPATAN
SPP SEKOLAH (STUDI KASUS PADA SMK
SWASTA TARBIYAH ISLAMİYAH
HAMPARAN PERAK)

Medan, Oktober 2019

KETUA PROGRAM STUDI



(Junawan, S.E., M.Si)

ANGGOTA II


(Hasrul Azwar Hasibuan, S.E., M.M)

ANGGOTA I


(Pipit Buana Sari, S.E., M.M)

ANGGOTA III


(Hernawaty, S.E., M.M)

ANGGOTA IV


(Anggi Pratama Nasution, S.E., M.Si)

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

NAMA : FITRIA

NPM : 1515100019

PROGRAM STUDI : AKUNTANSI

JUDUL SKRIPSI : ANALISIS PERHITUNGAN TARIF BIAYA
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN
IMPLIKASINYA TERHADAP PENDAPATAN
SPP SEKOLAH (STUDI KASUS PADA SMK
SWASTA TARBIYAH ISLAMIAH
HAMPARAN PERAK)

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya tulis saya sendiri dan bukan merupakan hasil karya orang lain (plagiat).
2. Memberikan izin hak bebas Royalti Non-Ekklusif kepada Unpab untuk menyimpan, mengahli-media/formatkan, mengelola, mendistribusikan dan mempublikasikan karya skripsinya melalui internet atau media lain bagi kepentingan akademis.

Penyataan ini saya perbuat dengan penuh tanggung jawab dan saya bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai dengan aturan yang berlaku apabila dikemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Medan, Oktober 2019

Penulis



Fitria

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

NAMA : FITRIA
NPM : 1515100019
PROGRAM STUDI : AKUNTANSI
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS PERHITUNGAN TARIF BIAYA
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN
IMPLIKASINYA TERHADAP PENDAPATAN
SPP SEKOLAH (STUDI KASUS PADA SMK
SWASTA TARBIYAH ISLAMIYAH
HAMPARAN PERAK)

Dengan ini mengajukan permohonan untuk mengikuti ujian sarjana lengkap pada Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka saya tidak akan lagi ujian perbaikan dimasa yang akan mendatang.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Medan, Oktober 2019

Penulis



Fitria

Plagiarism Detector v. 1092 - Originality Report:

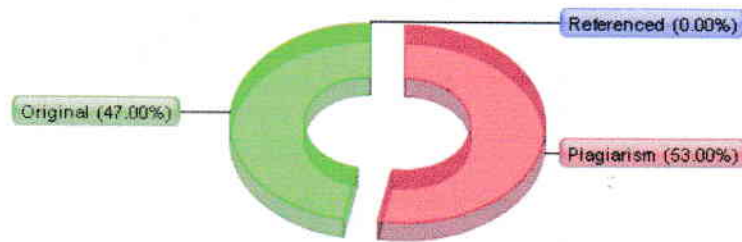
Analyzed document: 01/10/2019 15:49:07

"FITRIA_1515100019_AKUNTANSI.docx"

Licensed to: Universitas Pembangunan Panca Budi_License4



Relation chart:



Distribution graph:

Comparison Preset: Rewrite. Detected language: Indonesian

Top sources of plagiarism:

% 199	wrds: 31231	https://core.ac.uk/download/pdf/130811312.pdf
% 42	wrds: 6464	https://docplayer.info/amp/31561362-Analisis-perhitungan-biaya-satuan-unit-cost-dengan-mod...
% 31	wrds: 4776	https://kelembagaan.ristekdikti.go.id/wp-content/uploads/2016/11/Permendiknas20-2010NormaP...

Show other Sources:]

Processed resources details:

281 - Ok / 48 - Failed

Show other Sources:]

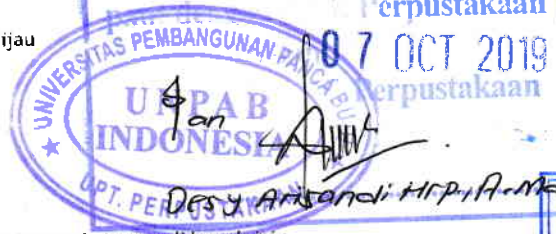
Important notes:

Wikipedia:	Google Books:	Ghostwriting services:	Anti-cheating:
[not detected]	[not detected]	[not detected]	[not detected]

Excluded Urls:

Dijadikan tidak ada sangkut paku dengan Perpustakaan

Hat : Permohonan Meja Hijau



Medan, 07 Oktober 2019
Kepada Yth : Bapak/Ibu Dekan
Fakultas SOSIAL SAINS
UNPAB Medan
Di -
Tempat



Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama : FITRIA
Tempat/Tgl. Lahir : HAMPARAN PERAK / 01 JULI 1997
Nama Orang Tua : JUMALI
N. P. M : 1515100019
Fakultas : SOSIAL SAINS
Program Studi : Akuntansi
No. HP : 085359091122
Alamat : Dusun Vi Perum Ruki Hamparan Perak

Datang bermohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat diterima mengikuti Ujian Meja Hijau dengan judul Analisis Perhitungan Tarif Biaya Penyelenggaraan Pendidikan dan Implikasinya terhadap Pendapatan SPP Sekolah (Studi Kasus pada SMK Swasta Tarbiyah Islamiyah Hamparan Perak), Selanjutnya saya menyatakan :

1. Melampirkan KKM yang telah disahkan oleh Ka. Prodi dan Dekan
2. Tidak akan menuntut ujian perbaikan nilai mata kuliah untuk perbaikan indeks prestasi (IP), dan mohon diterbitkan ijazahnya setelah lulus ujian meja hijau.
3. Telah tercap keterangan bebas pustaka
4. Terlampir surat keterangan bebas laboratorium
5. Terlampir pas photo untuk ijazah ukuran 4x6 = 5 lembar dan 3x4 = 5 lembar Hitam Putih
6. Terlampir foto copy STTB SLTA dilegalisir 1 (satu) lembar dan bagi mahasiswa yang lanjutan D3 ke S1 lampirkan ijazah dan transkripnya sebanyak 1 lembar.
7. Terlampir pelunasan kwintasi pembayaran uang kuliah berjalan dan wisuda sebanyak 1 lembar
8. Skripsi sudah dijilid lux 2 examplar (1 untuk perpustakaan, 1 untuk mahasiswa) dan jilid kertas jeruk 5 examplar untuk penguji (bentuk dan warna penjiilidan diserahkan berdasarkan ketentuan fakultas yang berlaku) dan lembar persetujuan sudah di tandatangani dosen pembimbing, prodi dan dekan
9. Soft Copy Skripsi disimpan di CD sebanyak 2 disc (Sesuai dengan Judul Skripsinya)
10. Terlampir surat keterangan BKKOL (pada saat pengambilan ijazah)
11. Setelah menyelesaikan persyaratan point-point diatas berkas di masukan kedalam MAP
12. Bersedia melunaskan biaya-biaya yang dibebankan untuk memproses pelaksanaan ujian dimaksud, dengan perincian sbb :

1. [102] Ujian Meja Hijau	: Rp.	500,000	07 / Oktober 2019 (K)
2. [170] Administrasi Wisuda	: Rp.	1,500,000	
3. [202] Bebas Pustaka	: Rp.	100,000	
4. [221] Bebas LAB	: Rp.	0	
Total Biaya	: Rp.	2,100,000	
5. uk. 50% / tahun	Rp.	2.625.000 1.050.000	
		Rp. 9.725.000	

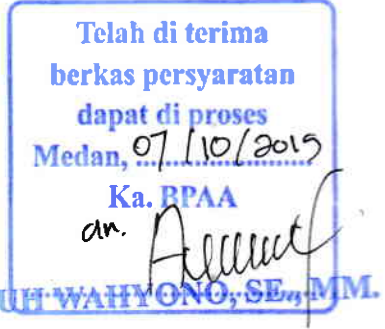
Ukuran Toga : M



Hormat saya
[Signature]
FITRIA
1515100019

Catatan :

- 1. Surat permohonan ini sah dan berlaku bila ;
 - o a. Telah dicap Bukti Pelunasan dari UPT Perpustakaan UNPAB Medan.
 - o b. Melampirkan Bukti Pembayaran Uang Kuliah aktif semester berjalan
- 2. Dibuat Rangkap 3 (tiga), untuk - Fakultas - untuk BPAA (astli) - Mhs.ybs.





UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI

FAKULTAS SOSIAL SAINS

Fakultas Ekonomi UNPAB, Jl. Jend. Gatot Subroto Km, 4,5 Medan Fax. 061-8458077 PO.BOX : 1099 MEDAN

PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI MANAJEMEN	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI AKUNTANSI	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI PERPAJAKAN	(TERAKREDITASI)

PERMOHONAN JUDUL TESIS / SKRIPSI / TUGAS AKHIR*

Pelaya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Lengkap : FITRIA
 Tempat/Tgl. Lahir : / 01 Juli 1997
 Nomor Pokok Mahasiswa : 1515100019
 Program Studi : Akuntansi
 Konsentrasi : Akuntansi Sektor Bisnis
 Jumlah Kredit yang telah dicapai : 140 SKS, IPK 3.84
 Nomor Hp : 085358568549
 Dengan ini mengajukan judul sesuai bidang ilmu sebagai berikut :

No.	Judul
1.	Analisis Perhitungan Tarif Biaya Penyelenggaraan Pendidikan Dan Implikasi Terhadap Pendapatan SPP Sekolah (Studi Kasus Pada SMK Swasta Tarbiyah Islamiyah Hamperan Perak)

Revisi : Diisi Oleh Dosen Jika Ada Perubahan Judul

Revisi Yang Tidak Perlu


 (Ir. Bhakti Alamasyah, M.T., Ph.D.)

Medan, 09 Mei 2019

Pemohon,

 (Fitria)

Tanggal :

Disahkan oleh :
 Dekan

(Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum.)

Tanggal :

Disetujui oleh:
 Ka. Prodi Akuntansi

(Anggi Pratama Nasution, SE., M.Si)

Tanggal :

Disetujui oleh:
 Dosen Pembimbing I :

(Pipit Buana Sari, SE, MM)

Tanggal :

Disetujui oleh:
 Dosen Pembimbing II :

(Hasrul Azwar Hasibuan, SE, MM)

No. Dokumen: FM-UPBM-18-02

Revisi: 0

Tgl. Eff: 22 Oktober 2018



**ANALISIS PERHITUNGAN TARIF BIAYA
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
DAN IMPLIKASINYA TERHADAP
PENDAPATAN SPP SEKOLAH
(Studi Kasus Pada SMK Swasta Tarbiyah Islamiyah
Hampanan Perak)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Ujian
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Pada Fakultas Sosial Sains
Universitas Pembangunan Panca Budi

Oleh:

FITRIA
NPM : 1515100019

*Ace Jilid 11
20/11/19*

*Ace Jilid 20/11/19
Pipit Buana.*

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN
2019**



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS

Jl. Jend. Gatot Subroto Km 4,5 Telp. (061) 50200511 PO. BOX. 1099 Medan
Email : ekonomi@pancabudi.ac.id <http://www.pancabudi.ac.id>

BERITA ACARA BIMBINGAN PROPOSAL/SKRIPSI

UNV / PTS : Universitas Pembangunan Panca Budi Medan
Fakultas : Sosial Sains
Dosen Pembimbing : Pipit Buana Sari, S.E., M.M
Nama Mahasiswa : Fitria
Jurusan/Program Studi : Akuntansi
No. Stambuk / NPM : 1515100019
Jenjang Pendidikan : Strata 1
Judul Skripsi : **Analisis Perhitungan Tarif Biaya Penyelenggaraan Pendidikan dan Implikasinya Terhadap Pendapatan SPP Sekolah (Studi Kasus Pada SMK Swasta Tarbiyah Islamiyah Hamparan Perak)**

Tanggal	Pembahasan Materi	Paraf	Keterangan
12/09/19	Beberapa teori dijelaskan bersumber di mana. Perhitungan belum diisi data Rumus, tujuan & kesimpulan tidak berkesinambungan.		ok
16/09/19	Hitungan ABC. dipergetas dgn langkah nya.		ok.

Medan, September 2019
Diketahui / Disetujui Oleh :
Dekan

Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum

Dosen Pembimbing

Pipit Buana Sari, S.E., M.M



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS

Jl. Jend. Gatot Subroto Km 4,5 Telp. (061) 50200511 PO. BOX. 1099 Medan
Email : pancabudi@pancabudi.ac.id <http://www.pancabudi.ac.id>

BERITA ACARA BIMBINGAN PROPOSAL/SKRIPSI

UNV / PTS : Universitas Pembangunan Panca Budi Medan
Fakultas : Sosial Sains
Dosen Pembimbing : Pipit Buana Sari, SE, MM
Nama Mahasiswa : Fitria
Jurusan/Program Studi : Akuntansi
No. Stambuk / NPM : 1515100019
Jenjang Pendidikan : Strata 1
Judul Skripsi : Analisis Perhitungan Tarif Biaya Penyelenggaraan Pendidikan Dan Implikasinya Terhadap Pendapatan SPP Sekolah (Studi Kasus Pada SMK Swasta Tarbiyah Islamiyah Hampan Perak)

Tanggal	Pembahasan Materi	Paraf	Keterangan
03/19 04	- Disarankan. ABC metode. - Kerangka Konseptual. diperbaiki dgn uji t.		Ok.
17/19 05	Acc Sempuro		Ok.

Medan, Mei 2019
Diketahui / Disetujui Oleh :
Dekan

Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum

Dosen Pembimbing ^{17/05/19}

Pipit Buana Sari, SE, MM



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS

Jl. Jend. Gatot Subroto Km 4,5 Telp. (061) 50200511 PO. BOX. 1099 Medan
Email : pancabudi@pancabudi.ac.id <http://www.pancabudi.ac.id>

BERITA ACARA BIMBINGAN PROPOSAL/SKRIPSI

UNV / PTS : Universitas Pembangunan Panca Budi Medan
Fakultas : Sosial Sains
Dosen Pembimbing : Hasrul Azwar Hasibuan, SE, MM
Nama Mahasiswa : Fitria
Jurusan/Program Studi : Akuntansi
No. Stambuk / NPM : 1515100019
Jenjang Pendidikan : Strata 1
Judul Skripsi : Analisis Perhitungan Tarif Biaya Penyelenggaraan Pendidikan Dan Implikasinya Terhadap Pendapatan SPP Sekolah (Studi Kasus Pada SMK Swasta Tarbiyah Islamiyah Hamparan Perak)

Tanggal	Pembahasan Materi	Paraf	Keterangan
17/05-19	Fitria > 5 basis data - 1 skripsi		

Medan, Mei 2019
Diketahui / Disetujui Oleh :
Dekan

Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum

Dosen Pembimbing

Hasrul Azwar Hasibuan, SE, MM



**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS**

Jl. Jend. Gatot Subroto Km 4,5 Telp. (061) 50200511 PO. BOX. 1099 Medan
Email : ekonomi@pancabudi.ac.id <http://www.pancabudi.ac.id>

BERITA ACARA BIMBINGAN PROPOSAL/SKRIPSI

UNV / PTS : Universitas Pembangunan Panca Budi Medan
Fakultas : Sosial Sains
Dosen Pembimbing : Pipit Buana Sari, SE., M.M
Nama Mahasiswa : Fitria
Jurusan/Program Studi : Akuntansi
No. Stambuk / NPM : 1515100019
Jenjang Pendidikan : Strata 1
Judul Skripsi : Analisis Perhitungan Tarif Biaya Penyelenggaraan Pendidikan Dan Implikasinya Terhadap Pendapatan SPP Sekolah (Studi Kasus Pada SMK Swasta Tarbiyah Islamiyah Hampan Perak)

Tanggal	Pembahasan Materi	Paraf	Keterangan
30/09.19	Acc Menya Higau		ok

Medan, September 2019

Diketahui / Disetujui Oleh :

Dekan

Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum



Dosen Pembimbing

Pipit Buana Sari, SE., M.M

30/09.19



**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS**

Jl. Jend. Gatot Subroto Km 4,5 Telp. (061) 50200511 PO. BOX. 1099 Medan
Email : ekonomi@pancabudi.ac.id <http://www.pancabudi.ac.id>

BERITA ACARA BIMBINGAN PROPOSAL/SKRIPSI

UNV / PTS : Universitas Pembangunan Panca Budi Medan
Fakultas : Sosial Sains
Dosen Pembimbing : Hasrul Azwar Hasibuan, SE, MM
Nama Mahasiswa : Fitria
Jurusan/Program Studi : Akuntansi
No. Stambuk / NPM : 1515100019
Jenjang Pendidikan : Strata I
Judul Skripsi : Analisis Perhitungan Tarif Biaya Penyelenggaraan Pendidikan Dan Implikasinya Terhadap Pendapatan SPP Sekolah (Studi Kasus Pada SMK Swasta Tarbiyah Islamiyah Hampanan Perak)

Tanggal	Pembahasan Materi	Paraf	Keterangan
	<p>Kutipan dari buku lebih dari 5 baris dipadi kan satu garis Azc Seday Meji Lupa 28/9 19.</p>		

Medan, September 2019
Diketahui / Disetujui Oleh :
Dekan

Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum



Dosen Pembimbing

Hasrul Azwar Hasibuan, SE, MM



YAYASAN PENDIDIKAN TARBIYAH ISLAMIYAH
SMK SWASTA
TARBIYAH ISLAMIYAH
HAMPARAN PERAK KABUPATEN DELI SERDANG

ALAMAT : Jln. Perintis Kemerdekaan Simpang Beringin Hamparan Perak, Kode Pos : 20374

No : 135 / 01. SMK / HP - TI / X / 2019

Lamp : -

Tgl : **Memberikan Izin Riset**

Kepada Yth,
Dekan Universitas Pembangunan Panca Budi
Fakultas Sosial Sains
Program Studi Akuntansi

Tempat

hubungan dengan surat Saudara Nomor 5523 / 17 / FSSA / 2019 tanggal 16 Juli 2019 Perihal permohonan Research, dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa yang tersebut dibawah ini :

Nama : FITRIA
No : 1515100019
Program Studi : Akuntansi
Judul Penelitian : **"ANALISIS TARIF BIAYA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN IMPLIKASINYA TERHADAP SPP SEKOLAH (STUDI KASUS PADA SMK TARBIYAH ISLAMIYAH HAMPARAN PERAK)"**

Swasta Tarbiyah Islamiyah Memberikan izin riset yang terhitung tanggal 22 Juli - 7 Agustus 2019.

Sehubungan surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih



Hamparan Perak, 04 Oktober 2019

Ka. SMK Tarbiyah Islamiyah

JUL KHAIRI SAM, S.Pd

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan (1) untuk mengetahui bagaimana penetapan tarif biaya pendidikan dengan menggunakan metode *Activity Based Costing* (2) dan untuk mengetahui perbedaan antara penetapan tarif biaya pendidikan dengan menggunakan metode *Activity Based Costing* dan biaya satuan pendidikan (*unit cost*) yang telah diterapkan oleh sekolah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dan komparatif dengan metode *Activity Based Costing* dalam melakukan penghitungan biaya satuan pendidikan. Hasil menunjukkan bahwa penerapan perhitungan Biaya Satuan Pendidikan menggunakan metode *Activity Based Costing* dilakukan dengan cara mengidentifikasi aktivitas di SMK Swasta Tarbiyah Islamiyah Hampan Perak yang meliputi aktivitas belajar mengajar, aktivitas kesiswaan, aktivitas pengembangan sekolah non SDM, aktivitas pengembangan sekolah SDM, aktivitas administrasi sekolah, aktivitas manajemen sekolah, dan aktivitas pengelolaan sarana prasarana dan mengumpulkan biaya yang terkumpul ke dalam aktivitas utama yaitu aktivitas belajar mengajar dan aktivitas kesiswaan. Pengelompokan didasarkan pada kesamaan driver masing-masing biaya, sehingga akan mempermudah perhitungan Biaya Satuan Pendidikan dan selanjutnya menentukan *Unit Cost* Per Siswa Berdasarkan *Activity Based Costing*. Dengan penghitungan berdasarkan *Activity Based Costing* terdapat perbedaan perhitungan SPP yang telah diterapkan dengan perhitungan menggunakan metode *Activity Based Costing* di SMK Swasta Tarbiyah Islamiyah Hampan Perak sehingga terjadi *overcosting* yakni Rp.17.265,44/siswa (Rp.130.000-Rp.112.734,56) untuk kelas X dan XI dan selisih sebesar Rp.97.265,44/siswa untuk kelas XII.

Kata Kunci : *Activity Based Costing*, Biaya Satuan Pendidikan, *Unit Cost*

ABSTRACT

This study aims (1) to find out how to determine the cost of education costs using the Activity Based Costing method (2) and to find out the difference between setting the cost of education costs using the Activity Based Costing method and the cost of education (unit costs) that have been applied by schools. This research uses descriptive and comparative research methods with the Activity Based Costing method in calculating the cost of education units. The results show that the application of the Education Unit Cost calculation using Activity Based Costing is done by identifying activities in Vocational High School of Tarbiyah Islamiyah which include teaching and learning activities, student activities, non-HR school development activities, HR school development activities, school administration activities, management activities shcool, and infrastructure management activities and collect costs collected into the main activities namely teaching and learning activities and student activities. The grouping is based on of the cost of education units and than determine the unit cost per student based on Activity Based Costing. With the calculation based on Activity Based Costing there is difference in the calculation of SPP that has been applied with calculation using the Activity Based Costing method at Vocational High School of Tarbiyah Islamiyah resulting in overcosting of Rp.17,265.44 / student (Rp.130,000-Rp.112,734.56) for classes X and XI and a difference of Rp. .97,265.44 / student for class XII.

Keywords : *Activity Based Costing, Unit Cost of Education, Unit Cost*

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT Tuhan yang Maha Esa atas berkah dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “**Analisis Perhitungan Tarif Biaya Penyelenggaraan Pendidikan Dan Implikasinya Terhadap Pendapatan SPP Sekolah (Studi Kasus Pada SMK Swasta Tarbiyah Islamiyah Hampan Perak)**”. Penulis menyadari bahwa dalam penyelesaian skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Hal ini disebabkan keterbatasan ilmu dan pengetahuan yang dimiliki penulis. Penulis juga menyadari dalam penyelesaian skripsi ini masih banyak kekurangan dan memerlukan penyempurnaan, untuk itu penulis menerima kritikan dan saran untuk penyempurnaan tugas akhir ini.

Dalam menyelesaikan tugas akhir ini penulis tidak lepas dari bimbingan, bantuan dan pengarahan dari berbagai pihak, untuk itu penulis mengucapkan rasa hormat dan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. H. Muhammad Isa Indrawan, S.E., M.M. selaku rektor Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
2. Ibu Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum. selaku dekan Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
3. Bapak Junawan, S.E., M.Si. selaku ketua program studi Akuntansi Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
4. Ibu Pipit Buana Sari, S.E., M.M. selaku dosen pembimbing I Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
5. Bapak Hasrul Azwar Hasibuan, S.E., M.M. selaku dosen pembimbing II Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

6. Kedua Orangtua saya, Ayahanda Jumali, Ibunda Dahniar, adik-adik saya Anisa Padila, Al Syifa Zahra dan Kayla Azkiya serta seluruh keluarga saya.
7. Bapak Julkhairi Sam, S.Pd., M.Si selaku kepala sekolah SMK Swasta Tarbiyah Islamiyah.
8. Kepada teman-teman seperjuangan yaitu Anggari, Alfiansyah, Atikah Sari Nasution, Yayuk Wulandari, Fitri Abdillah, Maisyarah dan teman-teman saya yang tidak bisa saya sebut satu per satu.
9. Semua pihak yang turut membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Medan, Oktober 2019

Penulis

Fitria

NPM : 1515100019

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PERTANYAAN.....	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah.....	8
C. Rumusan Masalah.....	9
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	10
E. Keaslian Penelitian.....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
A. Landasan Teori.....	12
1. Biaya Pendidikan	12
2. Biaya Satuan (<i>Unit Cost</i>) Pendidikan.....	20
3. <i>Activity Based Costing</i> (ABC).....	25
4. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)	30
B. Penelitian Sebelumnya	38
C. Kerangka Pemikiran.....	39
D. Hipotesis	41
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	43
A. Pendekatan Penelitian	43

B. Tempat dan Waktu Penelitian	43
C. Populasi dan Sampel / Jenis dan Sumber Data	44
D. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional	46
E. Teknik Pengumpulan Data.....	47
F. Teknik Analisis Data.....	48
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	49
A. Hasil Penelitian	49
1. Deskripsi Objek Penelitian.....	49
2. Manajemen Keuangan SMK Swasta Tarbiyah Islamiyah Hampan Perak	54
B. Analisis Data.....	56
1. Identifikasi dan Penggolongan Aktivitas.....	56
2. Pembebanan Biaya ke Aktivitas.....	59
C. Pembahasan.....	64
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	70
A. Kesimpulan	70
B. Saran	71
DAFTAR PUSTAKA	72
BIODATA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Mapping Penelitian Sebelumnya	38
Tabel 3.1 Skedul Proses Penelitian	44
Tabel 3.2 Operasional Variabel Penelitian	46
Tabel 4.1 Data Jumlah Peserta Didik.....	51
Tabel 4.2 Data Pendidik.....	51
Tabel 4.3 Data Tenaga Kependidikan.....	52
Tabel 4.4 Data Sarana dan Prasarana.....	52
Tabel 4.5 Rincian Jumlah Jam Pelajaran Efektif Per Tingkat	53
Tabel 4.6 Rincian Jumlah Jam Pelajaran Efektif Per Tingkat Per Kompetensi Keahlian.....	53
Tabel 4.7 Sumber Dana Pendidikan SMK Swasta Tarbiyah Islamiyah Hampan Perak Tahun Ajaran 2017/2018.....	55
Tabel 4.8 Pelaporan Keuangan	56
Tabel 4.9 Daftar Aktivitas dan Cara Pembebanannya	58
Tabel 4.10 Rekapitulasi Biaya Daya dan Jasa	59
Tabel 4.11 Rekapitulasi Biaya Pengembangan Sekolah Non SDM	60
Tabel 4.12 Rekapitulasi Biaya Pengembangan Sekolah SDM	60
Tabel 4.13 Rekapitulasi Biaya Administrasi Sekolah.....	61
Tabel 4.14 Rekapitulasi Biaya Manajemen Sekolah.....	61
Tabel 4.15 Rekapitulasi Biaya Pengelolaan Sarana Prasarana	62
Tabel 4.16 Rekapitulasi Biaya Aktivitas Belajar Mengajar.....	63
Tabel 4.17 Rekapitulasi Biaya Pengelolaan Aktivitas Kesiswaan.....	64
Tabel 4.18 Rekapitulasi Pembebanan Biaya ke Aktivitas	65

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran.....	41
Gambar 4.1 Struktur SMK Swasta Tarbiyah Islamiyah Hampan Perak.....	50

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan merupakan aspek yang sangat penting untuk diperbaiki oleh suatu negara. Pendidikan bertujuan untuk meningkatkan mutu sumber daya manusia, memperbaiki kualitas kehidupan, dan mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan serta teknologi yang telah berkembang pesat di era global. Dengan perkembangan teknologi, pendidikan akan berpengaruh pada produktivitas suatu negara. Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 alinea keempat menyatakan bahwa tujuan nasional Indonesia yakni melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Terwujud atau tidaknya tujuan nasional tersebut dapat ditentukan oleh beberapa faktor, salah satunya adalah pendidikan. Pendidikan memegang peran penting untuk memajukan suatu bangsa. Sebab, institusi yang paling mungkin dapat dan mampu menyiapkan sumber daya manusia yang andal dan bermoral adalah institusi pendidikan. Melalui institusi pendidikan masyarakat akan diberikan keteladanan, bimbingan, arahan, dan pengembangan kreativitas dalam proses pembelajaran.

Mulyono (2010:22) mengatakan bahwa pembangunan pendidikan pada dasarnya sama pentingnya dengan pembangunan ekonomi, sebab pembangunan ekonomi akan sulit digerakkan apabila sumber daya manusia (SDM) yang ada tidak mempunyai kemampuan. Sebagai bahan perbandingan, negara-negara

tetangga seperti Jepang, Korea, Singapura dan beberapa negara lainnya merupakan negara yang tidak memiliki sumber daya alam yang memadai, namun memiliki SDM andal yang mampu mendukung pergerakan roda ekonomi negara untuk memenuhi kebutuhan rakyatnya hingga mereka dapat menikmati kehidupan yang layak. Sedangkan di sisi lain, Indonesia merupakan negara yang memiliki sumber daya alam yang terbentang luas, namun tidak diimbangi dengan kualitas SDM yang memadai, sehingga belum mampu memanfaatkan sumber daya alam tersebut secara optimal. Padahal ditinjau dari segi kuantitas, Indonesia memiliki jumlah SDM yang cukup besar dan berpotensi untuk dapat mengelola seluruh sumber daya alam tersebut. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya peran pendidikan dalam menghasilkan SDM yang berkualitas demi kemajuan suatu bangsa. Oleh sebab itu, permasalahan pendidikan merupakan salah satu permasalahan yang diperhatikan secara serius oleh pemerintah.

Biaya pendidikan merupakan salah satu aspek yang ada di dalam lingkup pendidikan yang turut menunjang terlaksananya kegiatan penyelenggaraan pendidikan, sebab penyelenggaraan pendidikan tidak akan pernah terlaksana tanpa adanya dana untuk membiayainya. Biaya pendidikan dapat berasal dari bermacam-macam sumber, antara lain bersumber dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, sumbangan, swasta, dunia usaha dan orang tua. Biaya yang dikeluarkan baik dari pemerintah, masyarakat maupun pihak-pihak terkait untuk menyelenggarakan pendidikan akan sangat menentukan besarnya dana yang digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan. Wajar apabila dikatakan bahwa

ketercapaian tujuan pendidikan dapat ditentukan oleh besarnya dana pendidikan yang disediakan.

Ada empat permasalahan pokok yang berkaitan dengan pendidikan nasional di Indonesia, yakni (Moch. Idochi Anwar, 2013:168-169):

1. Permasalahan pendidikan yang berhubungan dengan pemerataan pendidikan.
2. Permasalahan pendidikan yang berhubungan dengan relevansi pendidikan.
3. Permasalahan pendidikan yang berhubungan dengan mutu pendidikan.
4. Permasalahan pendidikan yang berhubungan dengan efisiensi dan efektivitas pendidikan.

Masalah efisiensi dan efektivitas berkaitan dengan masalah biaya pendidikan baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Masalah biaya yang dimaksud adalah dapat tidaknya biaya pendidikan dengan jumlah tertentu memberikan hasil yang baik dan bermutu. Salah satu tantangan pengelolaan biaya pendidikan adalah memenuhi kebutuhan pendidikan yang bermutu dengan biaya yang murah. Hal tersebut dapat dicapai apabila ada kerjasama antara orangtua, pemerintah, dan pihak lain yang bersangkutan.

Penyediaan sumber daya untuk menyelenggarakan pendidikan secara menyeluruh pada semua kalangan masyarakat termasuk keluarga kurang mampu membawa implikasi pada biaya. Biaya perlu dihitung menggunakan informasi yang rinci tentang biaya satuan agar dapat diperkirakan kebutuhan dana untuk menyelenggarakan program pendidikan. Biaya pendidikan tiap sekolah maupun tiap siswa yang disebut dengan Biaya Satuan Pendidikan (*Unit Cost*) sangat penting bagi perencana pendidikan atau pemerintah karena dapat digunakan untuk mengetahui tingkat efisiensi penggunaan sumber daya, keuntungan dari investasi

pendidikan serta pemerataan pengeluaran masyarakat dan pemerintah untuk pendidikan.

Bastian (2015:136) mengatakan perhitungan biaya di sekolah dasar dan menengah yang ada saat ini masih sederhana dan belum mampu mengungkapkan informasi penting sebagai materi/landasan pengambilan keputusan, serta hanya sebatas informasi biaya per unit untuk belanja pegawai dan non pegawai. Perhitungan biaya yang ada belum mampu mengungkapkan dan memunculkan data informatif, seperti belum adanya standar atau pedoman perhitungan biaya per unit siswa. SMK Swasta Tarbiyah Islamiyah juga belum menerapkan pedoman atau standar perhitungan tarif biaya pendidikan yang sesuai dengan kegiatan atau aktivitas yang terjadi pada siswa.

Terdapat dua cara yang dapat digunakan untuk menghitung biaya satuan pendidikan atau biaya per unit siswa, yaitu perhitungan biaya secara tradisional dan perhitungan biaya berdasarkan aktivitas (*Activity Based Costing*). Indra Bastian (2015:350) berpendapat bahwa perhitungan biaya berdasarkan *activity based costing* didasarkan pada konsep pelayanan pendidikan yang mengkonsumsi aktivitas dan aktivitas yang mengkonsumsi sumber daya organisasi pelayanan pendidikan. Perhitungan biaya per unit dengan *Activity Based Costing* dapat digunakan oleh sekolah untuk menentukan biaya yang dibebankan kepada setiap siswa yang didasarkan atas aktivitas yang dilaksanakan. Hal tersebut juga sangat sesuai dengan penerapan kurikulum baru yaitu kurikulum 2013 yang mengakibatkan perubahan kegiatan pendidikan dengan memfokuskan pada aktivitas peserta didik.

Sekolah Menengah Kejuruan merupakan salah satu bentuk pendidikan menengah yang bertujuan agar peserta didik memiliki keahlian khusus dan setelah lulus siap bekerja pada bidang tersebut. Kompetensi keahlian yang ada di SMK sangat beragam dengan kebutuhan dan aktivitas yang beragam pula, sehingga akan sulit menentukan standar biaya pendidikan SMK. Penelitian ini dilakukan pada sebuah sekolah swasta yaitu sebuah Yayasan Pendidikan Tarbiyah Islamiyah di kecamatan Hamparan Perak. Yayasan Pendidikan Tarbiyah Islamiyah Hamparan Perak merupakan lembaga terstruktur dan terencana. Yayasan Pendidikan Tarbiyah Islamiyah Hamparan Perak sampai saat ini menaungi lembaga pendidikan dasar menengah yang terdiri dari tingkat SMP Swasta Tarbiyah Islamiyah Hamparan Perak, MTs Swasta Tarbiyah Islamiyah Hamparan Perak, SMA Swasta Tarbiyah Islamiyah Hamparan Perak, MA Swasta Tarbiyah Islamiyah Hamparan Perak dan SMK Swasta Tarbiyah Islamiyah Hamparan Perak. Penelitian yang saat ini dilakukan terfokus pada biaya pendidikan yang diberlakukan pada SMK Swasta Tarbiyah Islamiyah Hamparan Perak yaitu pada penetapan tarif SPP nya.

SMK pada saat ini mulai menjadi pusat perhatian dari pemerintah dan masyarakat tentang keberadaannya. Semakin banyaknya penyelenggaraan SMK semakin menimbulkan persaingan yang ketat. Di kecamatan Hamparan Perak sendiri SMK Swasta Tarbiyah Islamiyah Hamparan Perak menjadi SMK swasta favorit di kecamatan Hamparan Perak. SMK Swasta Tarbiyah Islamiyah Hamparan Perak merupakan salah satu sekolah menengah kejuruan yang menyelenggarakan standar kurikulum 2013 bagi siswanya dan memiliki 5

kompetensi keahlian, yaitu Akuntansi Keuangan Lembaga, Otomatisasi Tata Kelola Perkantoran, Teknik Komputer dan Jaringan, Teknik Kendaraan Ringan Otomotif dan Tata Kecantikan Kulit dan Rambut. Kegiatan-kegiatan atau aktivitas yang dilakukan oleh siswa masing-masing kompetensi keahlian sangat beragam. Keberagaman aktivitas disebabkan karena perbedaan pembelajaran praktik setiap kompetensi keahlian dan perbedaan tingkat kelas. Aktivitas yang berbeda ini menyebabkan adanya perbedaan jumlah dana pendidikan yang terserap oleh masing-masing siswa.

SMK Swasta Tarbiyah Islamiyah Hampan Perak memperoleh pendapatan dari BOSNAS (Biaya Operasional Sekolah Nasional) dan iuran pendidikan siswa (SPP). Pendapatan tersebut merupakan pendapatan yang didapatkan oleh SMK yang kemudian 100% dari hasil tersebut disetorkan ke pihak yayasan yang selanjutnya dikelola oleh yayasan. Besarnya SPP siswa ditetapkan berbeda-beda pada masing-masing tingkatan, khususnya tingkat XII. Penetapan SPP kepada siswa kelas X dan XI dengan nominal yang sama sebesar Rp. 130.000,00 per bulan, namun untuk penetapan SPP kelas XII sebesar Rp. 210.000 per bulan. Hal ini menyebabkan ketimpangan yang cukup signifikan, padahal sebagian biaya yang terjadi dikelas XII sudah ditanggung ke dalam pengelolaan dana BOS yang diterima. Informasi terkait biaya per unit siswa yang beragam menjadi hal yang perlu dan penting untuk diketahui. Penting bagi sekolah untuk mengkomunikasikan anggaran secara transparan kepada para *stakeholder*.

Perhitungan biaya penyelenggaraan pendidikan di SMK Swasta Tarbiyah Islamiyah Hampan Perak belum dihitung secara akurat. Perhitungan biaya di sekolah yang masih sangat sederhana belum mampu mengungkapkan alokasi-alokasi penting, sehingga keputusan yang diambil menjadi kurang tepat. Sekolah membutuhkan metode pembebanan biaya yang efisien dan tidak mengakibatkan distorsi pembebanan biaya. Salah satu cara terbaik dalam memperbaiki sistem perhitungan biaya adalah penerapan *Activity Based Costing*. Perhitungan menggunakan *Activity Based Costing* akan disesuaikan dengan karakteristik masing-masing biaya dan dengan *cost driver* yang berbeda-beda. Apabila sekolah mampu menghitung biaya yang akurat dan mengkomunikasikannya secara transparan maka diharapkan semua *stakeholder* mampu memanfaatkan informasi tersebut sebagai dasar pengambilan keputusan.

Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai perhitungan biaya satuan (*unit cost*) pendidikan dengan *Activity Based Costing* di SMK Swasta Tarbiyah Islamiyah Hampan Perak untuk menentukan harga pokok kegiatan pendidikan per siswa yang berjudul “**Analisis Perhitungan Tarif Biaya Penyelenggaraan Pendidikan Dan Implikasinya Terhadap Pendapatan SPP Sekolah (Studi Kasus Pada SMK Swasta Tarbiyah Islamiyah Hampan Perak)**”.

B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Untuk memudahkan dalam penelitian ini maka peneliti mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

- a. Pihak sekolah belum menrapkan standar atau pedoman perhitungan tariff biaya pendidikan peserta didik pada sekolah tingkat menengah sesuai kegiatan dan aktivitas yang dilakukan.
- b. Adanya ketimpangan penetapan SPPP yang cukup signifikan yang diberlakukan kepada siswa SMK Swasta Tarbiyah Islamiyah Hamparan Perak.
- c. Sistem pengelolaan dana pendidikan menengah masih bersifat sederhana sehingga belum mampu mengungkapkan informasi yang akurat.
- d. Perhitungan secara tradisional dinilai tidak menghasilkan perhitungan biaya yang akurat karena pembebanan biaya hanya menggunakan basis unit yang non representatif, sedangkan *Activity Based Costing* dinilai lebih akurat karena menggunakan aktivitas sebagai pemacu untuk menentukan besarnya konsumsi biaya.

2. Batasan Masalah

Mengingat keterbatasan kemampuan yang ada, maka untuk menghindari kesimpangsiuran di dalam pembahasan dan penganalisan, maka penulis membatasi masalah hanya pada permasalahan keterbatasan sekolah dalam menyediakan informasi mengenai biaya iuran pendidikan yang dihitung secara tepat. Biaya iuran pendidikan yang dihitung difokuskan pada analisis perhitungan

biaya satuan (*unit cost*) pendidikan di SMK Swasta Tarbiyah Islamiyah Hamparan Perak selama satu tahun anggaran, yakni tahun ajaran 2017/2018 menggunakan *Activity Based Costing*. Biaya iuran pendidikan dihitung per siswa per bulan selama tahun ajaran 2017/2018.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka rumusan masalah penelitian adalah :

1. Bagaimana tarif biaya pendidikan yaitu penetapan SPP dihitung dengan menggunakan metode *Activity Based Costing*?
2. Adakah perbedaan perhitungan tarif SPP menggunakan metode *Activity Based Costing* dengan biaya satuan pendidikan (*unit cost*) yang telah diterapkan oleh sekolah?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui bagaimana penetapan tarif biaya pendidikan dengan menggunakan metode *Activity Based Costing*.
- b. Untuk mengetahui perbedaan antara penetapan tarif biaya pendidikan dengan menggunakan metode *Activity Based Costing* dan biaya satuan pendidikan (*unit cost*) yang telah diterapkan oleh sekolah.

2. Manfaat Penelitian

Adapun penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat untuk:

- a. Bagi penulis, dapat menambah ilmu pengetahuan dan wawasan dalam penerapan dari teori *Activity Based Costing* dan kondisi nyata di lapangan dalam penetapan dan perhitungan tarif biaya menggunakan metode tersebut.
- b. Peneliti Selanjutnya, diharapkan akan dapat memberikan tambahan referensi mengenai penerapan dari metode *Activity Based Costing* dan dapat dibandingkan dengan teori yang berkaitan dengan metode *Activity Based Costing* serta kasus-kasus yang berhubungan dengan metode tersebut.
- c. Bagi Sekolah, memberikan masukan yang memungkinkan menerapkan metode *Activity Based Costing* dalam penetapan tarif biaya pendidikannya dan pengaruhnya terhadap pendapatan SPP sekolah tersebut.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian terdahulu merupakan dasar bagi peneliti untuk meneliti lebih lanjut mengenai judul ini. Analisis Perhitungan Tarif Biaya Penyelenggaraan Pendidikan Dan Implikasinya Terhadap Pendapatan SPP Sekolah ini merupakan replikasi dari penelitian Agus Widarsono (2010) yang berjudul “Analisis Perhitungan Tarif Biaya Penyelenggaraan Pendidikan Dan Implikasi Terhadap Pendapatan SPP Sekolah (Studi Kasus Pada SMK XXX Kota Serang)”, Universitas Pendidikan Indonesia.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada:

1. Lokasi penelitian: penelitian sebelumnya dilakukan di SMK XXX di Kota Serang, sedangkan penelitian ini dilakukan di SMK Swasta Tarbiyah Islamiyah Hampan Perak yang berlokasi di Jl. Perintis Kemerdekaan Simpang Beringin Hampan Perak, Deli Serdang, Sumatera Utara.
2. Waktu penelitian: penelitian sebelumnya dilakukan pada periode 2010/2011, sedangkan penelitian ini dilakukan pada tahun 2017/2018.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Biaya Pendidikan

Mulyono (2010:89) menyatakan bahwa biaya (*cost*) adalah jumlah uang yang disediakan (dialokasikan) dan digunakan atau dibelanjakan untuk terlaksananya berbagai fungsi atau kegiatan guna mencapai suatu tujuan dan sasaran-sasaran dalam rangka proses manajemen. Biaya (*cost*) menurut Syaiful Sagala (2014:223) merupakan seluruh dana baik yang langsung maupun tidak langsung yang diperoleh dari berbagai sumber (pemerintah, masyarakat, dan orang tua) yang diperuntukkan bagi penyelenggaraan sekolah. Menurut Horngen (2016:31) mendefinisikan biaya (*cost*) sebagai sumber dayayang dikorbankan (*sacarifed*) atau dilepaskan (*forgone*) untuk mencapai tujuan tertentu.

Indra Bastian (2015:339) menyimpulkan biaya merupakan pengorbanan sumber ekonomi yangdiukur dalam satuan uang, yang telah terjadi atau yang kemungkinan akan terjadi untuktujuan tertentu. Dalam definisi lain. Biaya (*expense*) adalah kos sumber daya yang telahatau dikorbankan untuk mewujudkan tujuan tertentu. Sedangkan Supriadi (2010:3) menjelaskan bahwa biaya pendidikan menjadi salah satu masukkan instrumental (*instrumental input*) yang sangatpenting dalam penyelenggaraan pendidikan. Dalam setiap upaya pencapaian tujuan pendidikan, baik tujuan-tujuan yang bersifat kuantitatif ataupun kualitatif, biaya pendidikan memiliki peran yang penting. Dari pendapat di atas dapat dilihat bahwa biaya diartikan tidak hanya berupa uang atau rupiah tetapi

dalam bentuk non moneter yaitu bukan uang seperti pengorbanan waktu seseorang dalam menempuh pendidikan ataupun dalam bentuk barang.

Menurut Moch. Idochi Anwar (2013:132), ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi agar pengeluaran dapat disebut biaya, yaitu:

1. Bahwa pengeluaran itu tak dapat dihindarkan
2. Bahwa pengeluaran itu dapat diduga sebelumnya
3. Bahwa pengeluaran itu secara kuantitatif dapat dihitung
4. Bahwa pengeluaran itu berhubungan erat pada hasil

Permendikbud Nomor 44 Tahun 2012 tentang Pungutan dan Sumbangan Biaya Pendidikan pada Satuan Pendidikan Dasar Pasal 1 Ayat (5) menyatakan bahwa biaya pendidikan adalah sumber daya keuangan yang disediakan dan/atau diperlukan untuk biaya satuan pendidikan, biaya penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan, serta biaya pribadi peserta didik sesuai peraturan perundang-undangan. Menurut Nurhayati (2011:29) biaya pendidikan adalah nilai rupiah dari seluruh sumber daya (input) atau seluruh pengeluaran dalam bentuk natura atau berupa uang yang digunakan untuk kegiatan pendidikan. Suhardan, dkk (2012:22) mendefinisikan biaya pendidikan sebagai total biaya yang dikeluarkan baik oleh individu peserta didik, keluarga yang menyekolahkan anak, warga masyarakat perorangan, kelompok masyarakat maupun yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk kelancaran pendidikan. Saputra (2013:289) menyatakan bahwa pembiayaan pendidikan dapat diartikan sebagai kajian tentang bagaimana pendidikan dibiayai, siapa yang membiayai, serta siapa yang perlu dibiayai dalam suatu proses pendidikan. Di dalam pernyataan tersebut terkandung dua hal, yakni berkaitan dengan sumber pembiayaan dan alokasi pembiayaan pendidikan.

Biaya (*cost*) dalam pengertian ini memiliki cakupan yang luas, yakni semua jenis pengeluaran yang berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan,

baik dalam bentuk uang maupun barang dan tenaga. Konsep biaya dalam bidang pendidikan akan terkait dengan organisasi pelayanan pendidikan sebagai produsen jasa pendidikan keahlian, keterampilan, ilmu pengetahuan, karakter dan nilai-nilai yang dimiliki seorang lulusan. Menurut Bastian (2015:339) ada 4 unsur pokok dalam definisi biaya pendidikan yakni:

1. Biaya merupakan pengorbanan sumber ekonomi
2. Diukur dalam satuan uang
3. Yang telah terjadi atau yang secara potensial akan terjadi
4. Pengorbanan tersebut untuk tujuan pendidikan

Berdasarkan sumber biaya yang ada, biaya pendidikan merupakan pengeluaran dan pemanfaatan keuangan untuk penyelenggaraan pendidikan yang sumbernya berasal dari pemerintah, perorangan dan masyarakat. Aktivitas pendidikan dapat dipilih dalam tiga bidang yaitu aktivitas kegiatan belajar mengajar, aktivitas penelitian, dan aktivitas pengabdian masyarakat. Masing-masing dari aktivitas tersebut dapat dihitung total biaya, unit biaya maupun indikator prestasi terkait dengan biaya.

Fattah (2018:55) Dalam Biaya Pendidikan dapat ditentukan oleh beberapa faktor antara lain:

1. Besar kecilnya sebuah institusi pendidikan
2. Jumlah siswa
3. Tingkat gaji atau tingkat pendidikan
4. Ratio siswa berbanding guru/dosen
5. Kualifikasi guru
6. Tingkat pertumbuhan penduduk (negara berkembang)
7. Perubahan kebijakan dari penggajian/pendapatan

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa biaya pendidikan adalah nilai uang atau nilai rupiah yang dikeluarkan oleh pemerintah,

penyelenggara pendidikan, masyarakat, maupun orang tua siswa, dalam bentuk natura (barang), pengorbanan peluang, maupun uang, yang digunakan untuk mengelola dan melaksanakan pendidikan, yang secara langsung menunjang efektivitas dan efisiensi pengelolaan pendidikan. Berkenaan dengan biaya pendidikan, pengklasifikasiannya sangat beragam dan banyak ahli yang mengemukakan pendapat yang berbeda-beda. Pemerintah mempunyai klasifikasi sendiri mengenai klasifikasi biaya pendidikan. Pada Peraturan Pemerintah (PP) No. 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, biaya pendidikan dibagi menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu:

1. Biaya satuan pendidikan adalah biaya penyelenggaraan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan yang meliputi : biaya investasi, biaya operasional, terdiri dari biaya personalia dan nonpersonalia, bantuan biaya pendidikan, dan beasiswa.
2. Biaya penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan adalah biaya penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan oleh pemerintah baik pemerintah provinsi, kabupaten/kota, atau penyelenggaraan/satuan pendidikan yang didirikan masyarakat.
3. Biaya pribadi peserta didik adalah biaya personal yang dikeluarkan oleh keluarga dari peserta didik

Sedangkan menurut Suharsaputra (2010 : 261), biaya pada lembaga pendidikan biasanya meliputi:

1. *Direct cost* dan *indirect cost*.
Direct cost (biaya langsung) adalah biaya yang secara langsung dapat dirasakan dalam pelaksanaan pendidikan dan dapat secara langsung pula meningkatkan mutu pendidikan. Sedangkan *Indirect cost* (biaya tidak langsung) meliputi biaya hidup, transportasi, dan biaya-biaya lainnya.

2. *Social cost* dan *private cost*. *Social cost* merupakan biaya publik, yaitu biaya sekolah yang harus dibayar oleh masyarakat sedangkan *private cost* adalah biaya yang dikeluarkan oleh keluarga yang membiayai sekolah anaknya, dan termasuk didalamnya *forgone oppurtunities* (biaya kesempatan yang hilang).

Pendapat lain dikemukakan oleh Matin (2013:158), Biaya pendidikan dibagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu :

1. Biaya pembangunan adalah biaya yang diperlukan sekolah dalam memenuhi kebutuhan akan barang-barang atau sarana prasarana sekolah untuk memberikan pelayan pendidikan dan dalam periode yang lama, seperti membangun gedung sekolah, membeli peralatan praktek dan lain-lain.
2. Biaya rutin adalah biaya yang dikeluarkan dalam waktu yang terus menerus atau yang bersifat rutin, secara berulang-ulang setiap bulan, setiap semester, atau setiap tahun.

Menurut Supriadi (2013:4) dalam teori dan praktik pembiayaan pendidikan, baik pada tatanan makro maupun mikro, biaya pendidikan dikelompokkan menjadi 3 (yaitu):

1. Biaya langsung (*direct cost*) adalah segala pengeluaran yang secara langsung menunjang penyelenggaraan pendidikan dan biaya tidak langsung (*indirect cost*) adalah pengeluaran yang tidak secara langsung menunjang proses pendidikan tetapi memungkinkan proses pendidikan tersebut terjadi di sekolah.
2. Biaya tidak langsung (*indirect cost*) adalah pengeluaran keluarga untuk pendidikan atau dikenal juga pengeluaran rumah tangga (*house hold expenditure*) dan biaya sosial (*social cost*) adalah biaya yang dikeluarkan oleh masyarakat untuk pendidikan, baik melalui sekolah maupun melalui pajak yang dihimpun oleh pemerintah kemudian digunakan untuk membiayai pendidikan.

Pasal 3 PP 48/2008 menyebutkan bahwa biaya pendidikan meliputi

1. Biaya satuan pendidikan;
2. Biaya penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan; dan
3. Biaya pribadi peserta didik

Biaya pendidikan dapat diklasifikasikan menjadi:

1. Biaya satuan pendidikan, meliputi:

- a. Biaya investasi yang terdiri dari biaya investasi lahan pendidikan dan biaya investasi selain lahan pendidikan;
- b. Biaya operasional yang terdiri dari biaya personalia dan biaya nonpersonalia, Biaya nonpersonalia meliputi bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, dan biaya tak langsung berupa daya, air, pemeliharaan sarana dan prasarana, konsumsi, dan lain sebagainya;
- c. Bantuan biaya pendidikan; dan
- d. Beasiswa.

2. Biaya penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan

Biaya penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan merupakan biaya yang penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan oleh pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota. Biaya penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan terbagi dua yakni biaya nonpersonalia dan biaya personalia. Adapun biaya nonpersonalia meliputi:

- a. Bahan atau peralatan pendidikan habis pakai;
- b. Biaya tidak langsung berupa daya, air, pemeliharaan sarana dan prasarana, konsumsi dan lain sebagainya.

Biaya personalia penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan, yang terdiri dari:

- a. Gaji pokok;
- b. Tunjangan yang melekat pada gaji;
- c. Tunjangan struktural bagi pejabat structural; dan

d. Tunjangan fungsional bagi pejabat fungsional untuk tenaga pendidik maupun tenaga kependidikan.

3. Biaya pribadi peserta didik.

Indra Bastian (2015:88) menyebutkan bahwa sumber pendanaan pendidikan berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 46 Ayat 1 meliputi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), serta sumber pendanaan pendidikan yang berasal dari masyarakat. Sumber pendanaan pendidikan dari masyarakat dapat mencakup sumbangan pendidikan, hibah, wakaf, zakat, pembayaran nadzar, pinjaman, sumbangan perusahaan, keringanan dan penghapusan pajak untuk pendidikan, serta dari penerimaan lain-lain yang sah. Menurut Dadang Suhardan, dkk (2012:21), sumber-sumber biaya pendidikan antara lain dari (1) pemerintah seperti APBN dan APBD; (2) sekolah (iuran siswa); (3) masyarakat (sumbangan); (4) dunia bisnis (perusahaan); dan (5) hibah.

Matin (2013:156-157) mengemukakan bahwa ada 5 (lima) jenis sumber pembiayaan pendidikan yang tidak saling terbuka dan nyatanya dapat memberikan kontribusi bersama-sama pada pembiayaan sistem pendidikan. Lima jenis sumber pembiayaan tersebut antara lain meliputi :

1. Sumber dari pemerintah berupa pajak, pinjaman pemerintah, bantuan dari pihak asing, dan lain-lain.
2. Sumber swasta berasal dari lembaga-lembaga yang mendukung sekolah-sekolah swasta.
3. Klien dari sistem pendidikan yakni yang berasal dari siswa dan orangtua seperti iuran SPP dan yang lainnya.
4. Penghasilan sekolah dan masyarakat yang meliputi semua jenis aktivitas yang dilakukan oleh sekolah seperti menjual hasil pertanian dan hasil kerajinan yang merupakan bagian dari paket sekolah.
5. Subsidi melalui institusi yakni di mana kegiatan pendidikan dibiayai oleh perusahaan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pajak.

Sumber-sumber pembiayaan pendidikan di sekolah menurut Tatang M. Amirin, dkk (2013: 92):

1. Anggaran rutin dan APBN (anggaran Pembangunan)
2. Dana penunjang pendidikan (DPP)
3. Bantuan/sumbangan dari BP3
4. Sumbangan dari Pemerintah daerah setempat (kalau ada)
5. Bantuan lain-lain.

Mulyono (2010:160) mengemukakan bahwa sumber keuangan dan pembiayaan suatu sekolah secara garis besar dapat dikelompokkan atas tiga sumber, yaitu :

1. Pemerintah, baik pemerintah pusat, daerah maupun kedua-duanya, uang bersifat umum atau khusus dan diperuntukkan bagi kebutuhan pendidikan,
2. Orangtua atau peserta didik.
3. Masyarakat, baik mengikat atau tidak mengikat.

Saavedra (2012:3-4) mengemukakan bahwa sumber utama keuangan pendidikan yaitu:

1. Keuangan Publik, yaitu berupa pengeluaran ataupun alokasi sumber daya dari pemerintah baik pusat, regional, maupun lokal.
2. Sumber Swasta, yaitu termasuk didalamnya rumah tangga, komunitas, organisasi masyarakat, dan sektor swasta. Kelompok rumah tangga merupakan sumber yang terbesar.
3. Sumber internasional, yaitu sumber daya pendidikan yang berasal dari badan-badan internasional, multilateral maupun bilateral, termasuk pinjaman.

Dari beberapa pendapat tentang biaya pendidikan yang telah disebutkan di atas, penulis menarik kesimpulan bahwa biaya pendidikan merupakan segala pengeluaran sumber daya baik dalam bentuk natura maupun berupa uang yang digunakan untuk menyelenggarakan kegiatan pendidikan guna mencapai tujuan pendidikan. Biaya pendidikan merupakan nilai uang yang dikeluarkan oleh pemerintah dan masyarakat dalam bentuk uang, barang, tenaga dan pengorbanan peluang yang digunakan untuk penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan proses belajar mengajar. Biaya pendidikan dapat berasal dari tiga sumber yakni dari pemerintah, baik pemerintah pusat, daerah maupun kedua-duanya, dari orangtua atau peserta didik, dan dari masyarakat, baik mengikat atau tidak mengikat. Biaya

pendidikan dari orangtua peserta didik dapat dihimpun melalui iuran SPP, sumbangan, dan lain sebagainya dan pembiayaan sekolah meliputi dua hal yaitu bagaimana memperoleh dana dan bagaimana menggunakan dana secara efektif dan efisien dalam jenjang pendidikan yang berbeda.

Menurut Tatang M. Amirin, dkk (2013:88-89), hal-hal yang berpengaruh terhadap pembiayaan pendidikan adalah:

1. Faktor eksternal, terdiri dari:
 - a. Berkembangnya demokrasi pendidikan
 - b. Kebijakan pemerintah
 - c. Tuntutan akan pendidikan
 - d. Adanya inflasi
2. Faktor internal, mencakup:
 - a. Tujuan pendidikan
 - b. Pendekatan yang digunakan
 - c. Materi yang disajikan
 - d. Tingkat dan jenis pendidikan

Dalam penelitian ini, faktor berpengaruh terhadap perhitungan biaya satuan pendidikan adalah faktor internal. Faktor internal mempengaruhi perbedaan aktivitas masing-masing peserta didik.

2. Biaya Satuan (*Unit Cost*) Pendidikan

Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai biaya satuan (*unit cost*) yang dalam penelitian ini adalah menjadi fokus utama. Biaya satuan (*unit cost*) dalam dunia pendidikan belum begitu banyak yang membahasnya padahal biaya satuan ini menjadi sangat penting dalam penentuan biaya untuk setiap siswa dalam menyelesaikan pendidikannya.

Nanang Fattah (2009:26) mendefinisikan biaya satuan per siswa adalah biaya rata-rata per siswa yang dihitung dari total pengeluaran sekolah dibagi seluruh siswa yang ada di sekolah dalam kurun waktu tertentu. Sedangkan Matin

(2013:160-161) mengungkapkan bahwa konsep biaya satuan adalah menunjuk kepada jumlah biaya rutin yang dihabiskan setiap siswa selama satu tahun ajaran. Biaya satuan dapat disebut biaya pendidikan untuk satu siswa dalam satu tahun pada jenjang pendidikan tertentu. Menurut Enoch (2015:239) biaya satuan menyatakan jumlah pengeluaran yang dipergunakan oleh setiap murid dalam suatu tahun tertentu, baik dalam system pendidikan secara keseluruhan, atau hanya pada tingkatan dan jenis pendidikan tertentu, atau mungkin saja dalam sekolah tertentu saja.

Mulyono (2010:27) mendefinisikan bahwa biaya satuan per murid (*unit cost*) merupakan ukuran yang menggambarkan seberapa besar uang yang dialokasikan ke sekolah-sekolah secara efektif untuk biaya satuan ini diperoleh dengan memperhitungkan jumlah murid pada masing-masing sekolah, maka ukuran biaya satuan dianggap standar dan dapat dibandingkan antara sekolah satu dengan sekolah lainnya.

Matin (2013:160-161) mengatakan bahwa konsep biaya satuan menunjuk kepada biaya rutin yang dihabiskan setiap siswa selama satu tahun ajaran. Biaya satuan biasanya dihitung untuk suatu sistem pendidikan secara keseluruhan, atau dilakukan hanya untuk satu jenjang pendidikan tertentu. Menurut Agus Irianto (2013:158) biaya satuan per murid merupakan ukuran yang menggambarkan seberapa besar uang yang dialokasikan sekolah secara efektif untuk kepentingan murid dalam menempuh pendidikan. Satuan biaya pendidikan adalah biaya rata-rata yang dikeluarkan untuk melaksanakan pendidikan di sekolah per murid per tahun anggaran, yang merupakan fungsi dari besarnya pengeluaran sekolah serta banyaknya murid dari sekolah tersebut. Satuan biaya dapat diketahui dengan cara membagi seluruh pengeluaran sekolah setiap tahun dengan jumlah murid di sekolah pada tahun tersebut. Biaya satuan ini diperoleh dengan memperhitungkan

jumlah murid dalam masing-masing sekolah, untuk itu biaya satuan dianggap standar dan dapat dibandingkan antar sekolah. Dengan menganalisis biaya satuan ini, memungkinkan kita mengetahui efisiensi dalam penggunaan sumber-sumber sekolah, keuntungan dari investasi pendidikan, dan pemerataan pengeluaran masyarakat serta pemerintah untuk pendidikan.

Menurut Sahertian (2014:215), penentuan *unit cost* dapat dibagi menjadi 2 (dua) macam, yakni:

1. *Unit cost* untuk keperluan rutin yaitu besarnya biaya yang diperlukan untuk mendidik seorang siswa pada satu tingkatan dan jenis pendidikan tertentu selama satu tahun.
2. *Unit cost* untuk biaya modal yaitu besarnya biaya yang diperlukan untuk menyediakan tempat bagi seorang siswa pada suatu tingkatan dan jenis pendidikan tertentu.

Menurut Amirin, dkk (2013:89), beberapa hal yang merupakan karakteristik atau ciri-ciri pembiayaan pendidikan adalah sebagai berikut:

1. Biaya pendidikan selalu naik dan perhitungan pembiayaan pendidikan dinyatakan dalam satuan *unit cost* yang meliputi:
 - a. *Unit Cost* lengkap, yaitu perhitungan *unit cost* berdasarkan semua fasilitas yang dikeluarkan untuk penyelenggaraan pendidikan.
 - b. *Unit Cost* setengah lengkap, yaitu perhitungan *unit cost* yang hanya memperhitungkan biaya kebutuhan yang berkenaan dengan bahan dan alat yang berangsur habis walaupun jangka waktunya berbeda.
 - c. *Unit Cost* sempit, yaitu *unit cost* yang diperoleh hanya dengan memperhitungkan biaya yang langsung berhubungan dengan kegiatan belajar mengajar.
2. Biaya terbesar dalam pelaksanaan pendidikan adalah biaya pada faktor manusia. Pendidikan dapat dikatakan sebagai "*human investment*" yang artinya biaya terbesar diserap oleh tenaga manusia.
3. *Unit Cost* pendidikan akan naik sepadan dengan tingkat sekolah.
4. *Unit Cost* pendidikan dipengaruhi oleh jenis lembaga pendidikan. Biaya untuk sekolah kejuruan lebih besar dari pada biaya untuk sekolah umum.
5. Komponen yang dibiayai dalam sistem pendidikan hampir sama dari tahun ke tahun.

Nanang Fattah (2012:11) mengemukakan bahwa terdapat 2 (dua) cara untuk menghitung *unit cost*:

- a. Biaya rata-rata per murid, yaitu biaya keseluruhan dibagi jumlah murid yang mendaftar di suatu sekolah/suatu level;
- b. Biaya rata-rata per lulusan adalah biaya total keseluruhan dibagi jumlah lulusan.

Berdasarkan beberapa pemaparan para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa biaya satuan (*unit cost*) merupakan biaya rata-rata per siswa yang dikeluarkan untuk memperoleh pendidikan dalam suatu kurun waktu tertentu. *Unit cost* ini dapat dijadikan sebagai standar biaya pendidikan per siswa yang dapat dibandingkan antar sekolah. Idealnya dalam sistem penganggaran di Indonesia adalah menggunakan prinsip *money follow function*, yaitu di mana pengalokasian anggaran untuk mendanai suatu kegiatan didasarkan pada tugas dan fungsi dari masing-masing satuan kerja/unit sesuai dengan amanat Undang-Undang. Prinsip ini menerangkan bahwa biaya atau uang yang dibutuhkan adalah sesuai dengan kegiatan atau aktivitas yang sudah dibuat terlebih dahulu bukan uang terlebih dulu ada kemudian baru menyusun kegiatan. Prinsip ini memungkinkan seluruh kegiatan yang ada dapat terlaksana secara tepat dan terencana. Lain halnya dengan Matin (2013:34) beliau mengungkapkan bahwa konsep biaya satuan adalah menunjuk kepada jumlah biaya rutin yang dihabiskan setiap siswa selama satu tahun ajaran. Biaya satuan dapat disebut biaya pendidikan untuk satu siswa dalam satu tahun pada jenjang pendidikan tertentu.

Menurut Nanang Fattah (2009:76) *Unit cost* dihitung hanya berdasarkan kepada biaya rutin atau disebut juga dengan biaya operasional. Biaya satuan per murid merupakan ukuran yang menggambarkan seberapa besar uang yang dialokasikan ke sekolah-sekolah secara efektif untuk kepentingan murid dalam menempuh pendidikan. *Unit cost* dibedakan menjadi *unit cost* biaya operasional dan *unit cost* biaya modal atau investasi, masing-masing memiliki kegunaan yang berbeda-beda. Jika kita ingin mengetahui berapa jumlah keperluan untuk setiap

siswa setiap tahunnya maka kita menggunakan *unit cost* biaya operasional untuk keperluan rutin sedangkan jika ingin menambah sarana prasarana sekolah maka menghitung *unit cost* untuk biaya modal.

Menteri Keuangan Republik Indonesia sudah mengatur setiap Kementerian Negara/Lembaga dalam menentukan biaya satuannya dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 37/PMK/.02/2012 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2013. Disebutkan bahwa standar biaya masukan adalah satuan biaya berupa harga satuan, tarif, dan indeks yang digunakan untuk menyusun biaya komponen masukan kegiatan. Standar biaya masukan ini berfungsi sebagai acuan untuk menyusun biaya komponen masukan kegiatan dalam RKA-K/L berbasis kinerja Tahun 2013 selain itu standar biaya masukan juga berfungsi sebagai batas tertinggi dalam penentuan biaya dan estimasi.

Dari uraian di atas mengenai biaya satuan (*unit cost*) dapat ditarik kesimpulan bahwa biaya satuan (*unit cost*) pendidikan adalah biaya rata-rata yang dikeluarkan oleh setiap siswa dalam kurun waktu tertentu untuk mendapatkan pendidikan. Biaya satuan (*unit cost*) dapat dijadikan standar dalam pemenuhan kebutuhan untuk setiap siswa di sekolah.

3. Activity Based Costing (ABC)

Witjaksono (2013:237) mengatakan *Activity Based Costing* (ABC) sebagai suatu pengukuran biaya produk atau jasa yang didasarkan atas penjumlahan biaya (*cost accumulation*) dari kegiatan atau aktivitas yang timbul

berkaitan dengan produksi atau jasa tersebut. ABC pada dasarnya mencari suatu metode atau cara untuk menghasilkan informasi biaya yang lebih akurat dengan cara melakukan identifikasi atas berbagai aktivitas yang dalam ABC disebut sebagai *activity driver*. Kemudian, Firdaus dan Wasilah (2012:320) berpendapat bahwa sistem ABC dapat menghasilkan informasi biaya produk yang lebih akurat dan dapat dipercaya dibandingkan dengan sistem penentuan biaya atau harga pokok yang sudah ada sebelumnya (*conventional costing system*), oleh karena itu sistem ini menggunakan jenis pemicu biaya (*cost drivers*) yang lebih banyak sehingga dapat mengukur secara lebih tepat sumber daya yang dikonsumsi oleh produk.

Activity Based Costing adalah suatu sistem akuntansi yang terfokus pada aktivitas-aktivitas yang dilakukan untuk menghasilkan produk/jasa. *Activity Based Costing* menyediakan informasi perihal aktivitas-aktivitas dan sumber daya yang dibutuhkan untuk melaksanakan aktivitas-aktivitas tersebut. Aktivitas adalah setiap kejadian atau transaksi yang merupakan pemicu biaya (*cost driver*) yakni bertindak sebagai faktor penyebab dalam pengeluaran biaya dalam organisasi. Aktivitas-aktivitas ini menjadi titik perhimpunan biaya. Dalam sistem ABC, biaya ditelusur ke aktivitas dan kemudian ke produk. Sistem ABC mengasumsikan bahwa yang mengkonsumsi sumber daya bukanlah produk, melainkan aktivitas-aktivitasnya (Mulyadi, 2010:108). Sistem ABC ini memperbaiki sistem kalkulasi biaya dengan mengidentifikasi aktivitas individual sebagai objek biaya dasar (*fundamental*). Perbedaan utama penghitungan antara akuntansi biaya tradisional

dengan ABC adalah jumlah *cost driver* (pemicu biaya) yang digunakan dalam metode ABC lebih banyak dibandingkan dalam sistem akuntansi biaya tradisional.

Ada dua keyakinan yang melandasi ABC *system*, yaitu (Carter, 2009:528) :

1. Biaya ada penyebabnya dan penyebab biaya adalah aktivitas.
2. Penyebab terjadinya biaya (yaitu aktivitas) dapat dikelola.

Sebelum membahas lebih jauh tentang ABC *system*, terdapat istilah-istilah yang harus diketahui diantaranya:

1. Aktivitas, adalah pekerjaan yang dilakukan dalam suatu organisasi. Aktivitas adalah tindakan, gerakan atau rangkaian pekerjaan. Aktivitas juga didefinisikan sebagai kumpulan tindakan yang dilakukan dalam organisasi yang berguna untuk tujuan penentuan biaya berdasarkan aktivitas.
2. Sumber daya, merupakan unsur ekonomis yang dibebankan atau digunakan dalam pelaksanaan aktivitas. Contoh dalam bidang pendidikan adalah guru, gaji, alat pendidikan, dan lain-lain.
3. Objek biaya, bentuk akhir dimana pengukuran biaya diperlukan. Dalam bidang pendidikan objek biaya adalah jasa/pelayanan jasa.
4. Elemen biaya, merupakan jumlah yang dibayarkan untuk sumber daya yang dikonsumsi oleh aktivitas dan terkandung di dalam *cost pool*. Contoh: biaya ujian, biaya penerimaan siswa baru, biaya praktek, dan lain-lain.

5. *Cost driver*, adalah faktor-faktor yang menyebabkan perubahan biaya aktivitas, *cost driver* merupakan faktor yang dapat diukur yang digunakan untuk membebankan biaya ke aktivitas dan dari aktivitas ke aktivitas lainnya, produk atau jasa. Contoh: jumlah siswa, jumlah guru, jumlah tenaga kependidikan, frekuensi kegiatan, frekuensi perbaikan, dan lain-lain.

Alasan menggunakan metode ABC diantaranya:

1. Biaya produksi *overhead* telah meningkat signifikan
2. Peningkatan biaya produksi *overhead* menyebabkan tidak berhubungan lagi dengan jam produktif.
3. Keragaman produk dan keragaman kebutuhan pelanggan telah tumbuh;
4. Beberapa produk perusahaan diproduksi dalam *batch* yang besar;
5. Persaingan global (*global competition*).

Menurut Femala (2012:23) tentang keunggulan *ABC system* adalah sebagai berikut :

1. Suatu pengkajian *ABC system* dapat meyakinkan manajemen bahwa mereka harus mengambil sejumlah langkah untuk menjadi lebih kompetitif. Sebagai hasilnya mereka dapat berusaha untuk meningkatkan mutu sambil secara simultan memfokus pada mengurangi biaya. Analisis biaya dapat menyoroti bagaimana benar-benar mahalnya proses produksi, yang pada akhirnya dapat memicu aktivitas untuk mereorganisasi proses, memperbaiki mutu dan mengurangi biaya.
2. *ABC system* dapat membantu dalam pengambilan keputusan.
3. Manajemen akan berada dalam suatu posisi untuk melakukan penawaran kompetitif yang lebih wajar.
4. Dengan analisis biaya yang diperbaiki, manajemen dapat melakukan analisis yang lebih akurat mengenai volume, yang dilakukan untuk mencari *break even* atas produk yang bervolume rendah. Melalui analisis data biaya dan pola konsumsi sumber daya, manajemen dapat mulai merencanakan kembali proses produksi untuk mencapai pola keluaran mutu yang lebih efisien dan lebih tinggi.

Bastian (2015:350) berpendapat penerapan *Activity Based Costing* di dalam organisasi pelayanan pendidikan merupakan suatu pendekatan terhadap sistem akuntansi pelayanan pendidikan yang memfokuskan pada pelayanan aktivitas yang dilakukan. Perhitungan biaya berdasarkan aktivitas disini didasarkan pada konsep pelayanan pendidikan yang mengkonsumsi aktivitas dan aktivitas yang mengkonsumsi sumber daya organisasi pelayanan pendidikan. Metode ini diharapkan dapat dijadikan pertimbangan bagi manajemen untuk mengurangi atau menghilangkan aktivitas yang tidak bernilai tambah atau aktivitas yang dipertimbangkan tidak memberikan kontribusi pada nilai peserta didik atau kebutuhan organisasi.

Indra Bastian (2015:351) juga mengatakan bahwa pada dasarnya sistem *Activity Based Costing* mengatribusikan biaya pelayanan pendidikan melalui dua tahap, yaitu:

1. Tahap pertama sistem ini menelusuri beban-beban sumber daya penunjang organisasi kepada aktivitas belajar mengajar yang dilakukan.
2. Tahap kedua, biaya pelayanan ditelusuri ke pelayanan pendidikan berdasarkan kegiatan belajar mengajar yang terkait dengan spesifik pelayanan pendidikan tertentu.

Firdaus dan Wasilah (2012:323) menyebutkan beberapa tahapan dalam penyusunan hingga implementasi ABC, antara lain meliputi:

1. Memeriksa ulang seluruh informasi keuangan perusahaan.
2. Menentukan tujuan penerapan sistem ABC.
3. Menetapkan aktivitas utama yang menyebabkan perubahan pada beban tidak langsung/*overhead*.
4. Menghubungkan biaya tidak langsung dengan aktivitas sehingga dapat dihitung tarif (*rate*) per unit untuk setiap dasar alokasi yang digunakan untuk membebankan biaya tidak langsung.
5. Menghitung biaya tidak langsung yang dibebankan pada objek biaya.
6. Menghitung total biaya untuk setiap objek biaya.
7. Menggunakan hasil perhitungan ABC tersebut untuk melakukan perbaikan dan pengambilan keputusan yang relevan.

Berdasarkan beberapa pemaparan terkait *Activity Based Costing* di atas, dapat disimpulkan bahwa *Activity Based Costing* merupakan suatu sistem

kalkulasi atau perhitungan biaya yang dalam mengukur pembebanan sumber dayanya didasarkan atas aktivitas yang dilakukan. Sistem *Activity Based Costing* ini memperbaiki sistem kalkulasi biaya dengan mengidentifikasi aktivitas individual sebagai objek biaya dasar (fundamental), sehingga mampu menghasilkan pembebanan biaya yang lebih akurat. Langkah awal penerapan sistem ABC ini adalah dengan mengidentifikasi kegiatan yang disesuaikan dengan visi, misi, tujuan, target, dan lingkungan satuan pendidikan. Kemudian, biaya dihitung berdasarkan kegiatan yang harus dilakukan.

Meskipun ABC memberikan alternatif penelusuran biaya ke produk individual secara lebih baik, tetapi juga mempunyai keterbatasan yang harus diperhatikan oleh manajer sebelum menggunakannya untuk menghitung biaya. keterbatasan ABC adalah:

1. Alokasi

Bahkan jika data aktivitas tersedia, beberapa biaya mungkin membutuhkan alokasi ke departemen atau produk berdasarkan ukuran volume yang arbitrer sebab secara praktis tidak dapat ditemukan aktivitas yang dapat menyebabkan biaya tersebut.

2. Mengabaikan biaya

Beberapa biaya yang diidentifikasi pada produk tertentu diabaikan dari analisis. Aktivitas yang biasanya sering diabaikan adalah pemasaran.

3. Pengeluaran dan waktu dikonsumsi

Sistem ABC sangat mahal untuk dikembangkan dan diimplementasikan dan membutuhkan waktu yang lama.

4. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)

Sekolah merupakan tempat berlangsungnya kegiatan pendidikan. Tempat dimana proses pembelajaran terjadi, interaksi antara guru dan siswa berlangsung, dan tempat pengembangan potensi siswa. Di Indonesia banyak sekali jenis sekolah, diantaranya sekolah yang berstatus negeri dan swasta mulai dari sekolah umum, kejuruan dan madrasah. Pendidikan menengah kejuruan adalah pendidikan pada jenjang pendidikan menengah yang mengutamakan pengembangan kemampuan siswa untuk melaksanakan jenis pekerjaan tertentu. Pendidikan menengah kejuruan mengutamakan penyiapan siswa untuk memasuki lapangan kerja serta mengembangkan sikap profesional. Sesuai dengan bentuknya, sekolah menengah kejuruan menyelenggarakan program-program pendidikan yang disesuaikan dengan jenis-jenis lapangan kerja (Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990). Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) merupakan salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat. Sekolah di jenjang pendidikan dan jenis kejuruan dapat bernama Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) atau Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), atau bentuk lain yang sederajat (Undang-undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003).

SMK memiliki banyak program keahlian. Program keahlian yang dilaksanakan di SMK menyesuaikan dengan kebutuhan dunia kerja yang ada. Program keahlian pada jenjang SMK juga menyesuaikan pada permintaan masyarakat dan pasar. Pendidikan kejuruan adalah pendidikan menengah yang

mempersiapkan peserta didik terutama agar siap bekerja dalam bidang tertentu. Peserta didik dapat memilih bidang keahlian yang diminati di SMK. Kurikulum SMK dibuat agar peserta didik siap untuk langsung bekerja di dunia kerja. Muatan kurikulum yang ada di SMK disusun sedemikian rupa sesuai dengan kebutuhan dunia kerja yang ada. Hal ini dilakukan agar peserta didik tidak mengalami kesulitan yang berarti ketika masuk di dunia kerja. Dengan masa studi sekitar tiga atau empat tahun, lulusan SMK diharapkan mampu untuk bekerja sesuai dengan keahlian yang telah ditekuni.

Tujuan pendidikan menengah kejuruan menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, terbagi menjadi tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum pendidikan menengah kejuruan adalah:

1. Meningkatkan keimanan dan ketakwaan peserta didik kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. Mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi warga Negara yang berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, demokratis dan bertanggung jawab;
3. Mengembangkan potensi peserta didik agar memiliki wawasan kebangsaan, memahami dan menghargai keanekaragaman budaya bangsa Indonesia; dan
4. Mengembangkan potensi peserta didik agar memiliki kepedulian terhadap lingkungan hidup dengan secara aktif turut memelihara dan melestarikan lingkungan hidup, serta memanfaatkan sumber daya alam dengan efektif dan efisien.

Tujuan khusus pendidikan menengah kejuruan adalah sebagai berikut:

1. Menyiapkan peserta didik agar menjadi manusia produktif, mampu bekerja mandiri, mengisi lowongan pekerjaan yang ada sebagai tenaga kerja tingkat menengah sesuai dengan kompetensi dalam program keahlian yang dipilihnya;
2. Menyiapkan peserta didik agar mampu memilih karir, ulet dan gigih dalam berkompotensi, beradaptasi di lingkungan kerja dan mengembangkan sikap profesional dalam bidang keahlian yang diminatinya;
3. Membekali peserta didik dengan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni agar mampu mengembangkan diri di kemudian hari baik secara mandiri maupun melalui jenjang pendidikan yang lebih tinggi; dan
4. Membekali peserta didik dengan kompetensi-kompetensi yang sesuai dengan program keahlian yang dipilih.

Dalam penelitian ini, fokusnya adalah pada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Undang-Undang (UU) Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menerangkan bahwa Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan. Pada jenjang pendidikan formal, satuan pendidikan dikelompokkan menjadi tiga yaitu satuan pendidikan dasar, satuan pendidikan menengah, dan satuan pendidikan tinggi. Satuan Pendidikan Menengah berbentuk Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Madrasah Aliyah

Kejuruan (MAK). Penyelenggaraan sekolah menengah kejuruan didasarkan atas ketentuan yang ada pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 tentang sistem pendidikan Nasional Bab IV pasal 11 ayat (1) dan (3) yang berbunyi sebagai berikut: “Jenis pendidikan umum, pendidikan kejuruan, pendidikan luar biasa, pendidikan kedinasan, pendidikan keagamaan, pendidikan akademik, dan pendidikan professional”. Sekolah menengah kejuruan merupakan sekolah yang setingkat sekolah menengah atas, hanya saja keduanya memiliki tujuan yang berbeda.

Pengertian mengenai sekolah menengah kejuruan terdapat pada Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2008 pasal 1 ayat (21) yang menyatakan bahwa Sekolah Menengah Kejuruan yang selanjutnya disingkat SMK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang Pendidikan Menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs. Undang-Undang Disdiknas nomor 20 tahun 2003 menyebutkan bahwa pendidikan kejuruan merupakan pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat bekerja dalam bidang tertentu. Sedangkan menurut Indra Bastian (2015:102) Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) merupakan pendidikan pada jenjang menengah yang mengutamakan pengembangan pengetahuan peserta didik untuk mengerjakan jenis pekerjaan tertentu, sehingga siap memasuki dunia kerja.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 29 tahun 1990 menerangkan tentang Pendidikan Menengah, “Pendidikan Menengah Kejuruan adalah pendidikan pada

jenjang pendidikan menengah yang mengutamakan pengembangan kemampuan siswa untuk pelaksanaan jenis pekerjaan tertentu”. Tujuan Pendidikan Kejuruan yang dirumuskan dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 29 tahun 1990, kemudian dijabarkan lagi dalam keputusan Mendikbud No. 0490/U/1990 sebagai berikut:

1. Mempersiapkan siswa untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi dan atau meluaskan pendidikan dasar.
2. Meningkatkan kemampuan siswa sebagai anggota masyarakat dalam mengadakan hubungan timbal balik dengan lingkungan sosial, budaya, dan sekitar.
3. Meningkatkan kemampuan siswa untuk dapat mengembangkan diri sejalan dengan pengembangan ilmu, teknologi, dan keterampilan.
4. Menyiapkan siswa untuk memasuki lapangan kerja dan mengembangkan sikap professional.

Pendidikan kejuruan diselenggarakan atas dasar prinsip-prinsip tertentu dan prinsip tersebut diambil menurut teori Wardiman (2018:38) yang dikenal dalam 16 prinsip pendidikan kejuruan, yaitu:

1. Pendidikan kejuruan akan efektif apabila lingkungan belajar dimanasiswa dilatih merupakan replika lingkungan dimana nanti ia akan bekerja.
2. Pendidikan kejuruan yang efektif hanya dapat diberikan dimana tugas-tugas dan latihan dilakukan dengan cara, alat dan mesin yang sama seperti yang ditempatkan di tempat kerja.

3. Pendidikan kejuruan akan efektif jika dalam melatih seseorang pada kebiasaan berpikir dan bekerja seperti yang dilakukan pada pekerjaan itu sendiri.
4. Pendidikan kejuruan akan efektif jika sejak latihan sudah dibiasakan dengan perilaku yang akan ditunjukkan dalam pekerjaannya kelak.
5. Pemberian latihan kejuruan yang efektif untuk semua profesi, perdagangan, pekerjaan hanya dapat diberikan kepada kelompok terpilih yang memang memerlukan, menginginkan dan sanggup memanfaatkannya.
6. Latihan pendidikan kejuruan akan efektif jika pemberian latihan yang berupa pengalaman khusus dapat diberikan terwujud dalam kebiasaan-kebiasaan yang benar dalam melakukan dan berpikir secara berulang-ulang hingga diperoleh penguasaan yang tepat guna dipekerjaanya.
7. Pendidikan kejuruan akan efektif jika pelatihnya cukup berpengalaman dan menerapkan kemampuan dan keterampilannya dalam mengajar.
8. Untuk setiap pekerjaan terdapat kompetensi minimal yang harus dimiliki oleh individu agar bisa menjabat pekerjaan itu. Jika pelatihan tidak diarahkan mencapai kompetensi minimal individu dan masyarakat akan rugi.
9. Pendidikan kejuruan harus mengenal kondisi kerja dan harapan pasar.

10. Proses pemantapan yang efektif tentang kebiasaan bagi setiap pelajar akan sangat tergantung dari proporsi sebagaimana latihan memberikan kesempatan untuk mengenal pekerjaan yang sesungguhnya.
11. Sumber data yang paling tepat untuk menetapkan materi pelatihan pendidikan kejuruan tidak ada lain kecuali pengalaman yang eratkaitannya dengan pekerjaan.
12. Untuk setiap jabatan terdapat bagian inti yang sangat penting dan ada bagian lain yang bisa cocok dengan pekerjaan lain atau jabatan lain.
13. Akan dirasakan efisien sebagai penyiapan pelayanan bagi masyarakat untuk kebutuhan tertentu pada waktu tertentu.
14. Pendidikan kejuruan akan bermanfaat secara sosial jika hubungan manusiawinya diperhatikan.
15. Administrasi pendidikan kejuruan kejuruan akan efisien jika bersifat lentur dibandingkan yang kaku.
16. Walaupun untuk sesuatu jenis pendidikan kejuruan telah diupayakan agar biaya per unit itu diperkecil, namun jika sudah sampai batas minimal tetapi ternyata hasilnya tidak efektif sebaiknya penyelenggaraan pendidikan kejuruan dibatalkan.

SMK menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan (diklat) sebagai program keahlian yang disesuaikan dengan kebutuhan lapangan kerja. Program keahlian tersebut dikelompokkan menjadi bidang keahlian sesuai dengan kelompok industri/usaha/profesi. Substansi yang diajarkan di SMK disajikan dalam bentuk berbagai kompetensi yang dinilai penting dan perlu bagi peserta

didik dalam menjalani kehidupan, sesuai dengan zamannya. Kompetensi yang dimaksud meliputi kompetensi-kompetensi yang dibutuhkan untuk menjadi manusia Indonesia yang cerdas dan pekerja yang kompeten, sesuai dengan standar kompetensi yang ditetapkan oleh industri/dunia usaha/asosiasi profesi. Untuk mencapai standar kompetensi tersebut, substansi diklat dikemas dalam berbagai mata diklat yang dikelompokkan dan diorganisasikan menjadi program normatif, adaptif, dan produktif.

Program normatif adalah kelompok mata diklat yang berfungsi membentuk peserta didik menjadi pribadi yang utuh, pribadi yang memiliki norma-norma kehidupan sebagai makhluk individu maupun makhluk sosial. Program normatif diberikan agar peserta didik dapat hidup dan berkembang selaras dalam kehidupan pribadi, sosial, dan bernegara. Program ini berisi mata diklat yang lebih menitikberatkan pada norma, sikap, dan perilaku yang harus diajarkan, ditanamkan, dan dilatih pada peserta didik, di samping kandungan pengetahuan dan keterampilan yang ada di dalamnya. Mata diklat pada kelompok normatif berlaku sama untuk semua program keahlian. Program adaptif adalah kelompok mata diklat yang berfungsi membentuk peserta didik sebagai individu agar memiliki dasar pengetahuan yang luas dan kuat untuk menyesuaikan diri atau beradaptasi dengan perubahan yang terjadi di lingkungan sosial ataupun lingkungan kerja, serta mampu mengembangkan diri sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Program adaptif berisi mata diklat yang lebih menitikberatkan pada pemberian kesempatan kepada peserta didik untuk memahami dan menguasai konsep dan prinsip dasar teknologi yang dapat

diterapkan pada kehidupan sehari-hari dan atau melandasi kompetensi untuk bekerja.

Program produktif adalah kelompok mata diklat yang berfungsi membekali peserta didik agar memiliki kompetensi kerja, sesuai standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI). Program produktif bersifat melayani permintaan pasar kerja, karena itu banyak ditentukan oleh dunia usaha/dunia industri atau asosiasi profesi. Program produktif diajarkan secara spesifik sesuai kebutuhan tiap program keahlian. Pendidikan kejuruan memungkinkan terlaksananya pembekalan keterampilan pada siswa, yang mana merupakan perbedaan utama antaras ekolah kejuruan dengan sekolah umum. Kenyataannya, lulusan sekolah menengah kejuruan lebih siap di dunia kerja dibandingkan lulusan sekolah umum. Sebab mereka memiliki bekal keterampilan yang dapat dijadikan sebagai pekerjaan tanpa harus mencari pekerjaa

B. Penelitian Sebelumnya

Penelitian sebelumnya merupakan penelitian yang sudah pernah dilakukan sebelumnya oleh peneliti lain berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan saat ini.

Tabel 2.1 Mapping Penelitian Sebelumnya

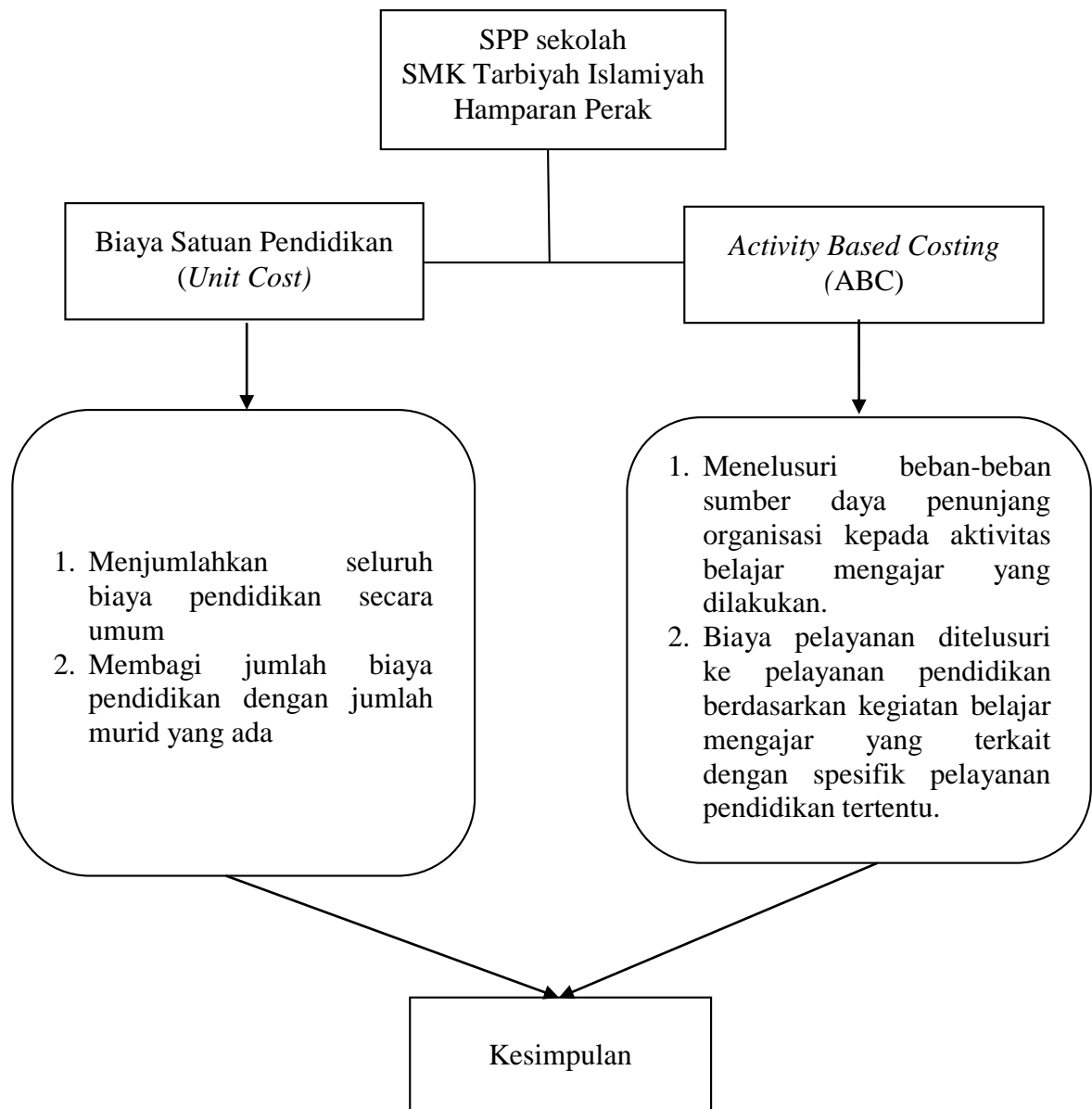
No	Nama / Tahun	Judul	Variabel	Model Analisis	Hasil Penelitian
1	Agus Widarsono / 2010	Analisis Perhitungan Tarif Biaya Penyelenggaraan Pendidikan Dan Implikasi Terhadap	<i>Unit Costing</i> dan <i>Activity Based Costing</i>	Deskriptif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa penetapan tarif menggunakan metode tradisional dan ACS terlihat adanya beberapa perbedaan selisih antara kedua tarif, namun jika

		Pendapatan SPP Sekolah (Studi Kasus Pada SMK XXX Kota Serang)			digunakan pendekatan statistik maka kedua tarif tersebut tidak memiliki perbedaan yang signifikan. Hasil tersebut kedua tarif sama-sama berpengaruh terhadap pendapatan SPP
2	Dhania Anggarani Putri / 2011	Analisis Penggunaan Metode <i>Activity Based Costing</i> Sebagai Alternatif Dalam Menentukan Tarif SPP SMP-SMA Pada YPI Nasima Semarang Tahun 2010	<i>Unit Costing</i> dan <i>Activity Based Costing</i>	Deskriptif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa tarif SPP dengan perhitungan menggunakan metode <i>Activity Based Costing</i> yang diberlakukan untuk murid baru tidak terpaut jauh dengan metode yang telah diterapkan Sekolah Nasima. Hanya saja, dengan menggunakan metode ABC, Sekolah Nasima dapat merencanakan anggaran secara tepat, terperinci, dan terprogram sehingga memudahkan manajemen dalam menyetarakan pendapatan dan pengeluaran.
3	Ria Maya Andrei/ 2016	Analisis Perhitungan Biaya Satuan (<i>Unit Cost</i>) Dengan Model <i>Activity Based Costing</i> (ABC) Di Smk Negeri 1 Wonosari	<i>Unit Costing</i> dan <i>Activity Based Costing</i>	Deskriptif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa penetapan tarif menggunakan metode tradisional dan ACS terlihat adanya beberapa perbedaan selisih antara kedua tarif, namun jika digunakan pendekatan statistik maka kedua tarif tersebut tidak memiliki perbedaan yang signifikan.

C. Kerangka Pemikiran

Aktivitas adalah peristiwa atau tugas dengan tujuan tertentu. Aktivitas yang terjadi di SMK Swasta Tarbiyah Islamiyah Hambaran Perak ditujukan untuk menghasilkan jasa pendidikan. Untuk mendukung jasa pendidikan, sekolah perlu tunjangan dana berupa SPP, yang diperlukan perhitungan akurat untuk menghasilkan biaya SPP yang tepat. Selama ini SMK Swasta Tarbiyah Islamiyah

Hampan Perak menggunakan metode *unit cost* dalam perhitungan biaya SPP yang dibebankan kepada siswa. Perhitungan tersebut dilakukan dengan menjumlahkan seluruh biaya yang dibebankan dan membaginya dengan seluruh jumlah siswa secara umum. Mengingat beragamnya kompetensi keahlian di SMK Swasta Tarbiyah Islamiyah Hampan Perak tentu dibutuhkan keakuratan biaya berdasarkan kompetensi keahlian karena aktivitas yang terjadi juga berbeda-beda. *Activity Based Costing* dihitung dengan menelusuri beban-beban sumber daya penunjang organisasi kepada aktivitas belajar mengajar yang dilakukan selanjutnya biaya pelayanan ditelusuri ke pelayanan pendidikan berdasarkan kegiatan belajar mengajar yang terkait dengan spesifik pelayanan pendidikan tertentu. Bila aktivitas yang dilakukan semakin banyak, maka tarif SPP juga meningkat. Kerangka pemikiran pada penelitian ini ditunjukkan oleh gambar berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

D. Hipotesis

Hipotesis adalah suatu penjelasan sementara tentang perilaku, fenomena, atau keadaan tertentu yang telah terjadi atau akan terjadi. Hipotesis merupakan pernyataan peneliti tentang hubungan antara variabel-variabel dalam penelitian, serta merupakan pernyataan yang paling spesifik. Hipotesis berupa pernyataan

mengenai konsep yang dapat dinilai benar atau salah jika menunjuk pada suatu fenomena yang diamati dan diuji secara empiris. Fungsi dari hipotesis adalah sebagai pedoman untuk dapat mengarahkan penelitian agar sesuai dengan apa yang kita harapkan. Hipotesis dalam penelitian ini adalah :

1. Tarif biaya pendidikan penetapan SPP dihitung dengan menggunakan metode *Activity Based Costing*.
2. Terdapat perbedaan perhitungan tarif SPP menggunakan metode *Activity Based Costing* dengan biaya satuan pendidikan (*unit cost*) yang telah diterapkan oleh sekolah.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dan komparatif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang dilakukan untuk memberikan gambaran yang lebih detail mengenai suatu gejala atau fenomena dengan hasil akhir yang biasanya berupa tipologi atau pola-pola mengenai fenomena yang sedang dibahas (Sugiyono, 2011:42). Analisis deskriptif dilakukan untuk memaparkan perhitungan biaya satuan per siswa. Sedangkan penelitian komparatif menurut Sugiyono (2014:54) adalah penelitian yang membandingkan keadaan satu variabel atau lebih pada dua atau lebih sampel yang berbeda, atau dua waktu yang berbeda. Adapun penerapan penelitian komparatif pada penelitian ini digunakan untuk mengetahui perbandingan antara besaran angka biaya satuan pendidikan per siswa yang dihitung dengan metode *Activity Based Costing* dengan biaya yang sudah diterapkan oleh sekolah. Perhitungan dilakukan menggunakan model *Activity Based Costing* (ABC) tahun ajaran 2017/2018.

B. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di SMK Swasta Tarbiyah Islamiyah Hampan Perak yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan Simpang Beringin Hampan Perak, Deli Serdang, Sumatera Utara 20374.

2. Waktu Penelitian

Penelitian ini penulis rencanakan mulai bulan Mei 2019 sampai dengan Oktober 2019 dapat dilihat pada tabel 3.1 berikut:

Tabel 3.1 Skedul Proses Penelitian

Jenis Kegiatan	Apr'19	Mei '19	Jun'19	Jul '19	Ags '19	Sep'19	Okt'19
Riset Awal / Pengajuan Judul	■						
Penyusunan Proposal	■	■					
Perbaikan/Acc Proposal		■					
Seminar Proposal			■				
Riset				■			
Pengolahan Data				■	■		
Penyusunan Skripsi				■	■		
Bimbingan Skripsi						■	
Ujian Skripsi							■

C. Populasi dan Sampel / Jenis dan Sumber Data

1. Populasi dan Sampel

Menurut Sugiyono (2011:80) pengertian populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh masyarakat sekolah SMK Swasta Tarbiyah Islamiyah Hambaran Perak yaitu kepala sekolah, wakil kepala sekolah, tenaga kependidikan dan siswa.

Menurut Sugiyono (2011:85) sampel adalah bagian atau jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar, dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misal

karena keterbatasan dana, tenaga dan waktu, maka peneliti akan mengambil sampel dari populasi itu. Apa yang dipelajari dari sampel itu, kesimpulannya akan diberlakukan untuk populasi. Untuk itu sampel yang diambil dari populasi harus representative. Dalam penelitian kuantitatif menggunakan non-probabilitas sampling dengan menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu menentukan sampel dengan pertimbangan tertentu yang dipandang dapat memberikan data secara maksimal. Adapun sampel dalam penelitian ini yakni kepala sekolah, wakil kepala sekolah, bendahara sekolah, serta kasubag Tata Usaha yang berlaku sebagai responden.

2. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya. Dalam penelitian ini data yang diperoleh merupakan data keterangan-keterangan yang diperoleh melalui observasi dan wawancara dengan pihak SMK Swasta Tarbiyah Islamiyah Hamparan Perak untuk memperkuat hasil penelitian. Data sekunder merupakan data yang bukan diusahakan sendiri oleh penulis, misalnya biostatistik, majalah, keterangan-keterangan atau publikasi lainnya (Marzuki, 2012:56). Data sekunder yang diperoleh peneliti berupa biaya-biaya yang terjadi dalam periode tertentu yang dibutuhkan, jumlah siswa, jumlah guru dan karyawan, dan informasi lain terkait perhitungan SPP.

D. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

Variabel pada penelitian ini terdiri atas :

1. Biaya Satuan (*Unit Cost*) Pendidikan

Biaya Satuan Pendidikan merupakan biaya per siswa yang terserap oleh siswa selama periode tertentu. *Unit Cost* ini dapat dijadikan sebagai standar biaya pendidikan yang dapat diperbandingkan.

2. *Activity Based Costing* (ABC)

Activity Based Costing merupakan perhitungan biaya yang dalam pembebanan sumber daya ke objek biayanya didasarkan atas aktivitas. *Activity Based Costing* ini digunakan untuk menghitung biaya pendidikan setiap siswa untuk masing-masing tingkat dan kompetensi keahlian berdasarkan aktivitas yang mereka lakukan.

Tabel 3.2 Operasional Variabel Penelitian

No	Variabel Penelitian	Definisi	Perhitungan
1	Biaya Satuan (<i>Unit Cost</i>) Pendidikan	Biaya Satuan Pendidikan merupakan biaya per siswa yang terserap oleh siswa selama periode tertentu. <i>Unit Cost</i> ini dapat dijadikan sebagai standar biaya pendidikan yang dapat diperbandingkan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menjumlahkan seluruh biaya pendidikan secara umum 2. Membagi jumlah biaya pendidikan dengan jumlah murid yang ada
2	<i>Activity Based Costing</i> (ABC)	<i>Activity Based Costing</i> merupakan perhitungan biaya yang dalam pembebanan sumber daya ke obyek biayanya didasarkan atas aktivitas. <i>Activity Based Costing</i> ini digunakan untuk menghitung biaya pendidikan setiap siswa untuk masing-masing	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menelusuri beban-beban sumber daya penunjang organisasi kepada aktivitas belajar mengajar yang dilakukan. 2. Biaya pelayanan ditelusuri ke pelayanan pendidikan berdasarkan kegiatan belajar mengajar yang terkait

		tingkat dan kompetensi keahlian berdasarkan aktivitas yang mereka lakukan.	dengan spesifik pelayanan pendidikan tertentu.
--	--	--	--

E. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang penulis gunakan adalah sebagai berikut:

1. Wawancara

Menurut Hasan (2012:32) Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan langsung oleh pewawancara kepada responden, dan jawaban-jawaban responden dicatat atau direkam.

Wawancara ini dilakukan untuk mendapatkan data dan informasi yang relevan dengan topik skripsi dari pihak-pihak yang bersangkutan.

2. Observasi

Menurut Hasan (2012:42) Observasi ialah pemilihan, pengubahan, pencatatan, dan pengodean serangkaian perilaku dan suasana yang berkenaan dengan organisasi, sesuai dengan tujuan-tujuan empiris. Peneliti melakukan pengamatan langsung untuk memperoleh data aktual mengenai sistem perhitungan biaya satuan pendidikan yang diterapkan pada SMK Swasta Tarbiyah Islamiyah Hampan Perak serta meneliti dan mempelajari pedoman, prosedur, dan kebijakan yang berlaku pada SMK Swasta Tarbiyah Islamiyah Hampan Perak.

3. Dokumentasi

Studi dokumentasi dilakukan sebagai teknik mengumpulkan data yang dibutuhkan dalam suatu penelitian guna memenuhi syarat suatu masalah yang akan diteliti.

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah suatu metode atau cara untuk mengolah sebuah data menjadi informasi sehingga karakteristik data tersebut menjadi mudah untuk dipahami dan juga bermanfaat untuk menemukan solusi permasalahan, yang terutama adalah masalah tentang sebuah penelitian. Analisis data juga bisa diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan untuk merubah hasil dari sebuah penelitian menjadi informasi yang nantinya bisa dipergunakan untuk mengambil sebuah kesimpulan. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Menghitung tarif SPP sekolah pada tahun 2017/2018 dengan metode biaya satuan pendidikan (*unit cost*).
2. Menghitung tarif SPP sekolah pada tahun 2017/2018 dengan menggunakan metode *Activity Based Costing*.
3. Menganalisis perbedaan tarif biaya pendidikan pada tahun 2017/2018 menggunakan metode biaya satuan pendidikan (*unit cost*) yang diterapkan oleh sekolah dengan metode *Activity Based Costing*.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Deskripsi Objek Penelitian

a. Profil SMK Swasta Tarbiyah Islamiyah Hamparan Perak

SMK Swasta Tarbiyah Islamiyah Hamparan Perak merupakan lembaga pendidikan menengah kejuruan yang terletak di kecamatan Hamparan Perak, tepatnya di Jalan Perintis Kemerdekaan No.1 Simpang Beringin, Kelurahan Selemak Hamparan Perak, Deli Serdang, Sumatera Utara. SMK Swasta Tarbiyah Islamiyah Hamparan Perak merupakan lembaga pendidikan kejuruan yang menjadi unggulan di wilayah kecamatan Hamparan Perak. SMK ini didirikan pada tanggal 15 Oktober pada tahun 2014 sesuai dengan SK No.: 421/4258/PDM/2015 tertanggal 29 Mei 2015.

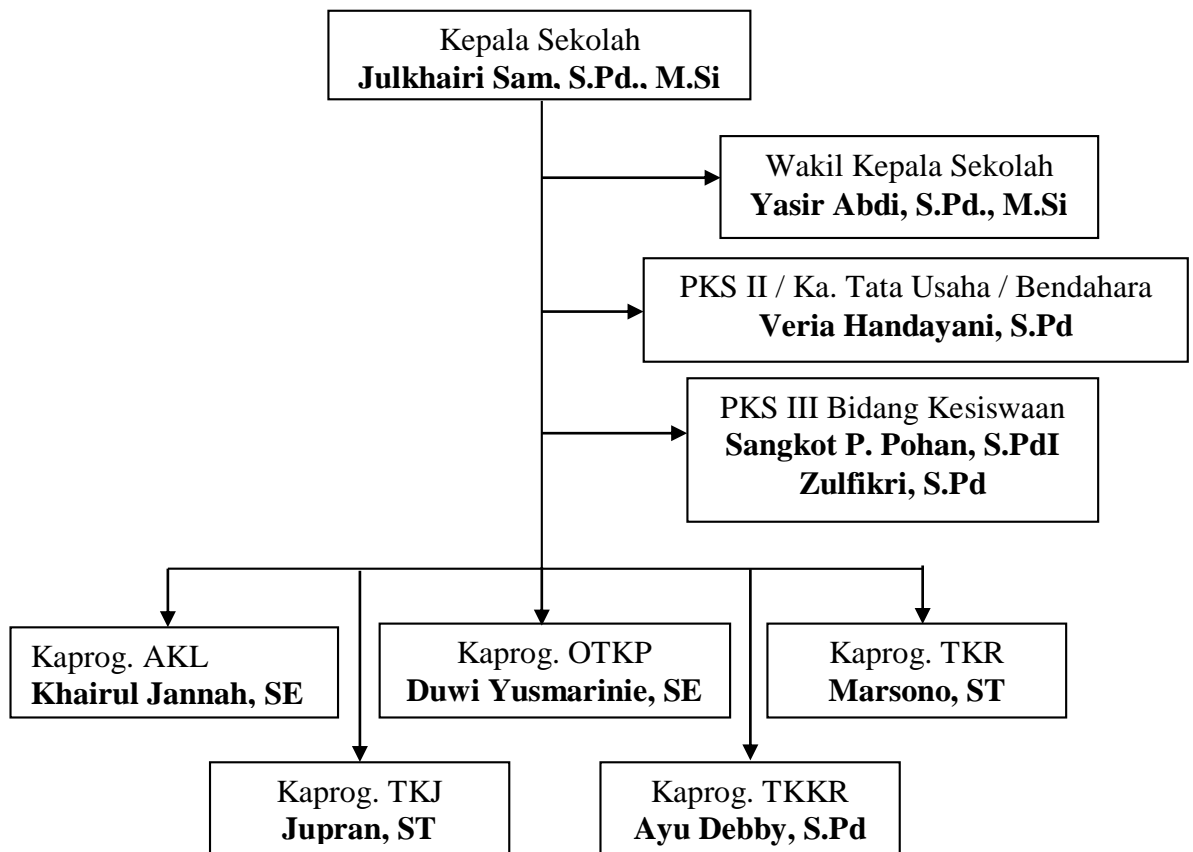
SMK Swasta Tarbiyah Islamiyah Hamparan Perak dalam upaya menciptakan dan mengembangkan peserta didik yang berkarakter dan berkualitas memiliki visi dan misi sebagai berikut:

- 1) Visi: Berkualitas, cerdas, terampil, dan Profesional Serta Terpercaya Dalam Segala Bidang Berdasarkan Imtaq dan Imtek.
- 2) Misi:
 - a) Mewujudkan pendidikan yang berkualitas tinggi.
 - b) Mewujudkan pendidik dan peserta didik yang cerdas dan terampil
 - c) Mewujudkan pendidikan yang terpercaya dan berstandard internasional.

- d) Mewujudkan nilai-nilai keimanan dan ketakwaan.
- e) Mewujudkan pendidikan yang melahirkan manusia yang professional
- f) Mewujudkan pendidikan meleak ilmu pengetahuan dan teknologi.

b. Struktur SMK Swasta Tarbiyah Islamiyah Hamperan Perak

Di dalam sebuah organisasi tentunya mempunyai struktur organisasi. Struktur organisasi sangat penting untuk memberikan gambaran tentang tugas dan wewenang serta tanggung jawab di setiap unit atau bagian di SMK Swasta Tarbiyah Islamiyah Hamperan Perak, sehingga setiap pekerjaan dapat terkoordinasi dengan lebih baik dan atasan akan lebih mudah dalam melakukan pengawasan dan pengarahan.



Gambar 4.1 Struktur SMK Swasta Tarbiyah Islamiyah Hamperan Perak

c. Peserta Didik dan Rombongan Belajar

SMK Swasta Tarbiyah Islamiyah Hampan Perak merupakan sekolah menengah kejuruan yang memiliki lima kompetensi keahlian yakni Akuntansi Keuangan Lembaga, Otomatisasi Tata Kelola Perkantoran, Teknik Komputer dan Jaringan, Teknik Kendaraan Ringan Otomotif dan Tata Kecantikan Kulit dan Rambut dengan rincian jumlah kelas sebagai berikut ini :

Tabel 4.1 Data Jumlah Peserta Didik

Kompetensi Keahlian	Kelas X		Kelas XI		Kelas XII	
	Jumlah Rombel	Jumlah Siswa	Jumlah Rombel	Jumlah Siswa	Jumlah Rombel	Jumlah Siswa
Akuntansi Keuangan Lembaga	2	42	2	40	1	36
Otomatisasi Tata Kelola Perkantoran	3	103	3	72	2	63
Teknik Komputer dan Jaringan	3	85	3	83	2	69
Teknik Kendaraan Ringan Otomotif	5	174	7	220	4	117
Tata Kecantikan Kulit dan Rambut	1	31	1	31	-	-
Jumlah	14	435	16	446	9	285

Sumber: Data SMK Swasta Tarbiyah Islamiyah Hampan Perak (2019)

d. Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Pihak sekolah dalam proses pembelajaran didukung oleh sebanyak 51 orang tenaga pengajar dan 14 orang karyawan. Berikut ini merupakan rincian dari jumlah tersebut.

Tabel 4.2 Data Pendidik

Status Kepegawaian	Gol. Ruang PNS			Jumlah
	II	III	IV	
1. Guru Tetap				
- PNS Diknas/Pemda	1	-	-	1
- PNS Depag	1	-	-	1
- Yayasan	-	-	-	-
2. Guru Tidak Tetap				

- Guru Tidak Tetap	-	-	-	49
- GTT PNS	-	-	-	-
- Guru Bantu/Kontrak	-	-	-	-
Jumlah	2	-	-	51

Sumber: Data SMK Swasta Tarbiyah Islamiyah Hampanan Perak (2019)

Tabel 4.3 Data Tenaga Kependidikan

No	Jabatan	PTT	Gol. Ruang PNS			Jumlah
			II	III	IV	
1	Kepala Tata Usaha	1	-	-	-	1
2	Bendahara	1	-	-	-	1
3	Staf Tata Usaha	2	-	-	-	2
4	Petugas Perpustakaan	1	-	-	-	1
5	Teknisi	1	-	-	-	1
6	Petugas Instalasi	-	-	-	-	-
7	Juru Bengkel	3	-	-	-	3
8	Penjaga Sekolah	2	-	-	-	2
9	Petugas Kebersihan	3	-	-	-	3
Jumlah		13	-	-	-	14

Sumber: Data SMK Swasta Tarbiyah Islamiyah Hampanan Perak (2019)

e. Sarana Prasarana

SMK Swasta Tarbiyah Islamiyah Hampanan Perak dalam pelaksanaan kegiatan pendidikan menyediakan sarana prasarana sebagai berikut:

Tabel 4.4 Data Sarana dan Prasarana

No	Nama Ruang	Jumlah	Luas (m ²)
1	Ruang Teori/Kelas	23	63
2	Ruang Perpustakaan	1	28
3	Ruang UKS	1	20
4	Ruang OSIS	1	16
5	Ruang Kepala Sekolah	1	12
6	Ruang Wakil Kepala Sekolah	1	30
7	Ruang Tata Usaha	1	30
8	Ruang Guru	1	42
9	Toilet WC	8	2
10	Aula Serbaguna	1	800
11	Toilet Guru	1	2
12	Toilet Pegawai	1	2
13	Ruang Ekskul	1	16
14	Ruang Praktek TKKR	1	50

15	Kantin	3	50
16	Ruang Praktek TKR	1	112
17	Unit Produksi	4	24
18	Ruang Praktek TKJ	1	100
19	Ruang BP	1	12
20	Ruang Praktek AK	1	42
21	Ruang Praktek AP	1	96
Jumlah		55	1549

Sumber: Data SMK Swasta Tarbiyah Islamiyah Hampanan Perak (2019)

f. Jumlah Jam Pelajaran Efektif

Jumlah jam pelajaran efektif merupakan jumlah waktu yang dialokasikan untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar secara efektif sesuai kalender pendidikan nasional dan kebijakan sekolah. Berikut ini merupakan tabel data jumlah jam pelajaran efektif per tingkat dan per kompetensi keahlian di SMK Swasta Tarbiyah Islamiyah Hampanan Perak.

Tabel 4.5 Rincian Jumlah Jam Pelajaran Efektif Per Tingkat

No	Kelas	Jumlah Jam Pelajaran 1 Minggu/Kelas	Jumlah Jam Pelajaran 1 Minggu/Tingkat	Jumlah Minggu Efektif	Jumlah Jam Pelajaran Efektif
1	Kelas X	40	560	38	21280
2	Kelas XI	40	640	38	24320
3	Kelas XII	40	360	26	9360
Jumlah		120	1560	102	54960

Sumber: Data SMK Swasta Tarbiyah Islamiyah Hampanan Perak (2019)

Tabel 4.6 Rincian Jumlah Jam Pelajaran Efektif Per Tingkat Per Kompetensi Keahlian

Kompetensi Keahlian	Kelas X		Kelas XI		Kelas XII	
	Rombel	Jumlah Jam	Rombel	Jumlah Jam	Rombel	Jumlah Jam
Akuntansi Keuangan Lembaga	2	3040	2	3040	1	1040
Otomatisasi Tata Kelola Perkantoran	3	4560	3	4560	2	2080
Teknik Komputer dan Jaringan	3	4560	3	4560	2	2080
Teknik Kendaraan Ringan Otomotif	5	7600	7	10640	4	4160

Tata Kecantikan Kulit dan Rambut	1	1520	1	1520	-	
Jumlah	14	21280	16	24320	9	9360

Sumber: Data SMK Swasta Tarbiyah Islamiyah Hamparan Perak (2019)

2. Manajemen Keuangan SMK Swasta Tarbiyah Islamiyah Hamparan

Perak

a. Perencanaan dan Penganggaran

Proses manajemen keuangan diawali dengan perencanaan dan penganggaran melalui penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah (RKAS). Proses manajemen keuangan di SMK Swasta Tarbiyah Islamiyah Hamparan Perak diawali dengan perencanaan atau penganggaran yakni melalui penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah (RKAS) atau Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Sekolah (RAPBS) yang disusun oleh pihak-pihak terkait yang ada di dalam lingkup sekolah, seperti kepala sekolah, wakil kepala sekolah, komite sekolah, bendahara sekolah, kasubag TU, dan ketua paket keahlian. RAPBS disusun sesuai dengan kebutuhan sekolah untuk satu tahun ajaran. Kebutuhan yang dianggarkan tersebut dirangkum oleh manajemen sekolah berdasarkan usulan yang dilakukan oleh berbagai pihak yang ada di dalam lingkup sekolah seperti guru mata pelajaran yang disampaikan melalui ketua paket keahlian, kasubag TU, maupun wakil kepala sekolah untuk dibahas dalam rapat tim penyusunan anggaran dan dikemas menjadi RAPBS.

b. Pelaksanaan dan Pengelolaan

Tahap pelaksanaan dilakukan melalui proses penggunaan dana sesuai sumber. Tahap pelaksanaan anggaran dilakukan melalui proses pengelolaan dana

sesuai dengan sumber dana masing-masing, yang mana masing-masing sumber dana dikelola oleh bendahara. Dana yang berasal dari komite sekolah diterima dari wali murid dikelola sekolah untuk digunakan sesuai dengan RAPBS, sedangkan dana yang bersumber dari pemerintah berupa BOSNAS (Biaya Operasional Sekolah Nasional) dikelola sesuai juknis yang pencairannya dilaksanakan melalui transfer di bank. Berikut ini merupakan rincian dana sumber dana pendidikan yang diterima oleh SMK Swasta Tarbiyah Islamiyah Hamparan Perak untuk tahun ajaran 2017/2018.

Tabel 4.7 Sumber Dana Pendidikan SMK Swasta Tarbiyah Islamiyah Hamparan Perak Tahun Ajaran 2017/2018

No	Sumber Dana	Jumlah	Proporsi
1	Komite Sekolah		
	a. Saldo Akhir Juni 2017	Rp. 55.000.000	
	b. Iuran Bulanan Siswa		
	Kelas X = Rp. 130.000 x 435 siswa x 12 bulan	Rp. 678.600.000	
	Kelas XI = Rp. 130.000 x 446 siswa x 12 bulan	Rp. 695.760.000	
	Kelas XII = Rp. 210.000 x 285 siswa x 12 bulan	Rp. 718.200.000	
	Jumlah Penerimaan Komite Sekolah	Rp. 2.147.560.000	56,81%
2	Dana BOS 1166 siswa x Rp. 1.400.000	Rp. 1.632.400.000	43,19%
	Jumlah	Rp. 3.779.960.000	100%

Sumber: RAPBS SMK Swasta Tarbiyah Islamiyah Hamparan Perak (2019)

*Proporsi = $\frac{\text{Jumlah penerimaan dana berdasarkan sumber}}{\text{Total Penerimaan Dana}} \times 100\%$

c. Pelaporan

Tahap pelaporan dilakukan dengan pembuatan laporan pertanggungjawaban yang disusun oleh masing-masing pengelola sumber dana. Tahap pelaporan dilaksanakan melalui penyusunan laporan realisasi anggaran yang disusun sebagai pertanggungjawaban. Laporan keuangan tersebut meliputi beberapa laporan keuangan, antara lain Laporan Realisasi Anggaran BOS dan Laporan Realisasi Komite yang dibuat oleh bagian pengelola masing-masing

untuk dilaporkan ke pusat pertanggungjawaban dari masing-masing sumber dana tersebut.

Tabel 4.8 Pelaporan Keuangan

No	Jenis Laporan	Periode Pelaporan	Dilaporkan Kepada
1	Laporan Realisasi Komite	Setiap Bulan	Kepala Sekolah
		Setiap triwulan	-
		Setiap semester	Pengurus Komite
		Setiap tahun	-
2	Laporan Dana APBD	Setiap triwulan	Dinas Kabupaten
3	Laporan BOSDA	Setiap tahun	Dinas Provinsi
4	Laporan BOS Pusat	Setiap semester	Dinas Pusat

Sumber: Hasil Wawancara

d. Pengawasan Keuangan

Proses pengawasan dilaksanakan langsung dari dinas. Pengawasan terkait pengelolaan keuangan di SMK Swasta Tarbiyah Islamiyah Hampan Perak secara rutin dilakukan melalui pelaksanaan audit internal oleh tim auditor internal yang dibentuk oleh sekolah untuk melakukan pengauditan keuangan secara rutin setiap bulannya. Selain itu, sekolah juga akan diaudit secara insidental terkait dengan pengalokasian dana BOSNAS (Biaya Operasional Sekolah Nasional) oleh auditor eksternal melalui monitoring dari dinas kabupaten maupun dinas provinsi, serta dari direktorat yang biasanya dilakukan dua kali dalam satu tahun.

B. Analisis Data

1. Identifikasi dan Penggolongan Aktivitas

Berdasarkan identifikasi data Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah (RKAS) SMK Swasta Tarbiyah Islamiyah Hampan Perak dapat diketahui bahwa terdapat tujuh aktivitas yang dapat diklasifikasikan menjadi dua pusat aktivitas, yaitu aktivitas langsung dan aktivitas tidak langsung. Aktivitas langsung

atau aktivitas utama merupakan aktivitas yang berhubungan langsung dengan siswa yang terdiri dari aktivitas belajar mengajar dan aktivitas kesiswaan. Aktivitas tidak langsung atau aktivitas penunjang merupakan aktivitas yang secara tidak langsung menunjang keterlaksanaan dari aktivitas utama. Aktivitas penunjang di SMK Swasta Tarbiyah Islamiyah Hampan Perak meliputi aktivitas pengembangan sekolah SDM, aktivitas pengembangan sekolah non SDM, aktivitas administrasi sekolah, aktivitas manajemen sekolah, dan aktivitas pengelolaan sarana prasarana.

Menurut Indra Bastian (2016:74) Ada tujuh aktivitas tersebut juga dapat diklasifikasikan dalam tiga golongan aktivitas, yaitu *result-producing activities*, *result-contributing activities*, dan *support activities*. Aktivitas yang termasuk dalam *result-producing activities* adalah aktivitas belajar mengajar dan aktivitas kesiswaan yang merupakan aktivitas utama dan secara langsung berhubungan dengan siswa. Aktivitas yang termasuk dalam *result-contributing activities* adalah aktivitas pengelolaan sarana prasarana dan aktivitas manajemen sekolah karena kedua aktivitas tersebut secara langsung memberikan dukungan ke *result-producing activities*. Sedangkan aktivitas yang termasuk dalam *support activities* adalah aktivitas pengembangan sekolah SDM, aktivitas pengembangan sekolah non SDM, dan aktivitas administrasi sekolah.

Indra Bastian (2016:81) juga mengungkapkan bahwa pembebanan biaya yang dikeluarkan oleh sekolah berdasarkan data RKAS dilakukan dengan *direct tracing*, *driver tracing*, dan *allocation*. Penentuan cara pembebanan biaya dilakukan dengan mengidentifikasi apakah biaya termasuk biaya langsung atau

tidak langsung. Biaya langsung atau biaya yang secara langsung dikeluarkan untuk membiayai aktivitas akan dibebankan secara *direct tracing*. Biaya tidak langsung atau biaya yang tidak secara langsung berhubungan dengan aktivitas akan dibebankan secara *driver tracing* atau secara *allocation*. Biaya yang dibebankan menggunakan *driver tracing* adalah biaya yang memiliki perantara penggerak terhadap aktivitas atau dapat ditelusuri sebab akibat adanya biaya tersebut. Sementara, biaya yang dibebankan menggunakan *allocation* adalah biaya yang tidak dapat ditelusuri sebab akibat adanya biaya tersebut sehingga pembebanan hanya bisa menggunakan basis asumsi. Berikut ini merupakan tabel daftar aktivitas dan cara pembebanannya:

Tabel 4.9 Daftar Aktivitas dan Cara Pembebanannya

Aktivitas	Golongan Aktivitas	Pembebanan Biaya
Aktivitas Utama		
Belajar Mengajar	<i>Result-producing activities</i>	<i>Direct tracing, Driver tracing, Allocation</i>
Kesiswaan	<i>Result-producing activities</i>	<i>Direct tracing, Driver tracing, Allocation</i>
Aktivitas Penunjang		
Pengembangan Sekolah Non SDM	<i>Support activities</i>	<i>Driver tracing</i>
Pengembangan Sekolah SDM	<i>Support activities</i>	<i>Driver tracing</i>
Administrasi Sekolah	<i>Support activities</i>	<i>Allocation</i>
Manajemen Sekolah	<i>Result-contributing activities</i>	<i>Allocation</i>
Pengelolaan Sarana Prasarana	<i>Result-contributing activities</i>	<i>Driver tracing</i>

2. Pembebanan Biaya ke Aktivitas

Pembebanan biaya dari Rancangan Kegiatan Anggaran Sekolah yang telah diidentifikasi belum mencakup semua biaya yang dikeluarkan untuk pembiayaan pendidikan di sekolah.

a. Pembebanan Biaya Daya dan Jasa

Biaya daya dan jasa yang digunakan oleh SMK Swasta Tarbiyah Islamiyah Hampan Perak meliputi biaya telepon, listrik, PAM, dan internet. Biaya daya dan jasa dialokasikan menggunakan *driver* luas ruangan dengan asumsi semakin luas ruangan akan membutuhkan listrik yang semakin banyak. Asumsi tersebut diperoleh dari pertimbangan data dan keterbatasan penelusuran informasi penelitian. Jumlah luas ruangan yang ada di SMK Swasta Tarbiyah Islamiyah Hampan Perak adalah 2.500 m².

Rincian perhitungan pembebanan biaya daya dan jasa dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.10 Rekapitulasi Biaya Daya dan Jasa

No	Rincian	Jumlah Dibebankan
1	Pembayaran Listrik	Rp 12.048.000
2	Pemabayaran Pulsa/Modem	Rp 3.000.000
Jumlah		Rp. 15.048.000

Sumber: Data SMK Swasta Tarbiyah Islamiyah Hampan Perak (2019)

b. Aktivitas Pengembangan Sekolah Non SDM

Biaya pada aktivitas pengembangan sekolah non SDM berkaitan dengan pengeluaran untuk pengembangan fisik sekolah. Rekapitulasi biaya pengembangan sekolah non SDM dari hasil identifikasi SMK Swasta Tarbiyah Islamiyah Hampan Perak adalah sebagai berikut:

Tabel 4.11 Rekapitulasi Biaya Pengembangan Sekolah Non SDM

No	Rincian	Jumlah Dibebankan
1	Kegiatan Keagamaan	Rp. 24.000.000
2	Kegiatan Hari Besar Nasional	Rp 16.000.000
3	Kegiatan Lomba-Lomba	Rp. 50.000.000
Jumlah		Rp. 90.000.000

Sumber: Data SMK Swasta Tarbiyah Islamiyah Hampan Perak (2019)

c. Aktivitas Pengembangan Sekolah SDM

Biaya pada aktivitas pengembangan sekolah SDM berkaitan dengan pengeluaran untuk pengembangan kualitas sumber daya manusia di sekolah (guru dan karyawan) dalam rangka meningkatkan kinerja yang berkaitan dengan aktivitasnya. Rekapitulasi biaya pengembangan sekolah SDM dari hasil identifikasi RKAS SMK Swasta Tarbiyah Islamiyah Hampan Perak dan ditambah dengan alokasi biaya kegiatan sosial adalah sebagai berikut:

Tabel 4.12 Rekapitulasi Biaya Pengembangan Sekolah SDM

No	Rincian	Jumlah Dibebankan
1	Workshop / MGMP	Rp. 32.000.000
2	Updating Data Siswa / Guru /Pegawai	Rp. 20.000.000
3	Penyusunan Laporan Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Rp. 2.412.000
4	Workshop Ketatausahaan dan Pegawai	Rp. 16.000.000
5	Honor Keamanan, Kebersihan dan Teknisi	Rp. 90.000.000
6	Honor Pengurus Yayasan	Rp.120.000.000
7	Kesejahteraan Guru/Pegawai	Rp. 18.000.000
Jumlah		Rp.298.412.000

Sumber: Data SMK Swasta Tarbiyah Islamiyah Hampan Perak (2019)

d. Aktivitas Administrasi Sekolah

Biaya dalam aktivitas administrasi sekolah mencakup seluruh pengeluaran yang digunakan dalam kegiatan administrasi di sekolah. Aktivitas administrasi sekolah menerima pembebanan biaya gaji tenaga kependidikan,

biaya kegiatan sosial, pembebanan dari aktivitas pengembangan sekolah non SDM, dan pembebanan dari aktivitas pengembangan sekolah SDM. Berikut ini rincian biaya administrasi sekolah hasil identifikasi RKAS SMK Swasta Tarbiyah Islamiyah Hampanan Perak.

Tabel 4.13 Rekapitulasi Biaya Administrasi Sekolah

No	Rincian	Jumlah Dibebankan
1	Konsumsi Tamu	Rp. 4.800.000
2	Honor Kepsek/PKS/Pegawai	Rp.264.000.000
3	Konsumsi Guru dan Pegawai	Rp. 24.000.000
Jumlah		Rp.292.800.000

Sumber: Data SMK Swasta Tarbiyah Islamiyah Hampanan Perak (2019)

e. Aktivitas Manajemen Sekolah

Biaya dalam aktivitas manajemen sekolah mencakup pengeluaran yang berkaitan dengan proses manajemen/ pengelolaan sekolah. Aktivitas manajemen sekolah menerima penyusunan RKA/RKAS sekolah, manajemen sekolah, pengelolaan perkantoran dan lainnya serta pembebanan dari aktivitas pengembangan sekolah non SDM, pembebanan dari aktivitas pengembangan sekolah SDM, dan pembebanan dari aktivitas administrasi sekolah. Berikut ini rincian biaya manajemen sekolah hasil identifikasi RKAS SMK Swasta Tarbiyah Islamiyah Hampanan Perak.

Tabel 4.14 Rekapitulasi Biaya Manajemen Sekolah

No	Rincian	Jumlah Dibebankan
1	Penyusunan RKS/RKAS	Rp. 2.400.000
2	Kegiatan pengembangan Manajemen Sekolah	Rp. 3.000.000
3	Kegiatan Pengelolaan Perkantoran	Rp.12.500.000
4	Kegiatan Supervisi, Monitoring dan Evaluasi	Rp. 12.000.000
5	Kegiatan Humas	Rp. 15.000.000
Jumlah		Rp. 44.900.000

Sumber: Data SMK Swasta Tarbiyah Islamiyah Hampanan Perak (2019)

f. Aktivitas Pengelolaan Sarana Prasarana

Biaya dalam aktivitas pengelolaan sarana prasarana mencakup pengeluaran yang berkaitan dengan pemeliharaan dan pengadaan sarana prasarana sekolah. Aktivitas pengelolaan sarana prasarana juga menerima pembebanan biaya daya dan jasa, biaya kegiatan sosial, pembebanan dari aktivitas pengembangan sekolah non SDM, pembebanan dari aktivitas pengembangan sekolah SDM, pembebanan dari aktivitas administrasi sekolah, dan pembebanan dari aktivitas manajemen sekolah. Berikut ini rincian biaya pengelolaan sarana prasarana hasil identifikasi RKAS SMK Swasta Tarbiyah Islamiyah Hamparan Perak.

Tabel 4.15 Rekapitulasi Biaya Pengelolaan Sarana Prasarana

No	Rincian	Jumlah Dibebankan
1	Perawatan Alat Kantor/Infrastruktur Sekolah	Rp. 81.000.000
2	Pengadaan Komputer	Rp. 20.000.000
3	Pengadaan Laptop	Rp. 6.000.000
4	Pengadaan Printer	Rp. 2.000.000
5	Pemeliharaan dan Perbaikan Ruang Kepala Sekolah/PKS/Tata Usaha	Rp. 6.000.000
6	Pemeliharaan dan Perbaikan WC Siswa dan Guru	Rp. 18.000.000
7	Pemeliharaan dan Perbaikan Lingkungan Sekolah	Rp. 12.000.000
Jumlah		Rp. 145.000.000

Sumber: Data SMK Swasta Tarbiyah Islamiyah Hamparan Perak (2019)

g. Aktivitas Belajar Mengajar

Biaya dalam aktivitas belajar mengajar mencakup pengeluaran yang berkaitan dengan aktivitas belajar mengajar. Aktivitas belajar mengajar juga menerima pembebanan dari aktivitas pengembangan sekolah non SDM, pembebanan dari aktivitas pengembangan sekolah SDM, pembebanan dari aktivitas administrasi sekolah, dan pembebanan dari aktivitas manajemen sekolah.

Berikut ini rincian biaya aktivitas belajar mengajar hasil identifikasi RKAS SMK Swasta Tarbiyah Islamiyah Hampan Perak.

Tabel 4.16 Rekapitulasi Biaya Aktivitas Belajar Mengajar

No	Rincian	Jumlah Dibebankan
1	Penyusunan KKM	Rp. 7.200.000
2	Penyusunan Kriteria Kenaikan Kelas	Rp. 1.600.000
3	Les Tambahan Kelas XII	Rp. 18.000.000
4	Try Out Kelas XII	Rp. 25.110.000
5	Pra Uji Kompetensi Kejuruan	Rp. 11.160.000
6	Ujian Kompetensi Kejuruan	Rp. 27.900.000
7	Pelaksanaan Ujian Sekolah	Rp. 41.800.000
8	Pelaksanaan Ujian Nasional	Rp. 27.900.000
9	Penyusunan dan Pembagian Tugas dan jadwal Pembelajaran	Rp. 2.000.000
10	Penyusunan prota, prosem, silabus dan RPP	Rp. 5.000.000
11	Penyusunan Program LAB, Bengkel, Ruang Kerja dan Perpustakaan	Rp. 1.000.000
12	Pengadaan Sarana Penunjang KBM	Rp. 20.000.000
13	Pengadaan Alat Pembelajaran Produktif	Rp. 625.000.000
14	Pelaksanaan PPDB	Rp. 10.000.000
15	Pemeliharaan dan perbaikan ruang kelas	Rp. 57.000.000
16	Pemeliharaan dan Perbaikan Lab/Bengkel/Kerja/Perpus	Rp. 18.000.000
17	Pengadaan dan Perawatan Mobilier termasuk buku	Rp. 200.000.000
18	Honor Guru	Rp. 756.000.000
19	Honor Praktek	Rp. 151.200.000
20	Ujian Tengah Semester	Rp. 15.000.000
21	Ujian Semester	Rp. 18.000.000
22	Remedial dan pengayaan	Rp. 8.000.000
Jumlah		Rp. 2.046.870.000

Sumber: Data SMK Swasta Tarbiyah Islamiyah Hampan Perak (2019)

h. Aktivitas Kesiswaan

Biaya dalam aktivitas kesiswaan mencakup pengeluaran yang berkaitan dengan pemeliharaan dan pengadaan kesiswaan. Aktivitas pengelolaan kesiswaan juga menerima pembebanan biaya kegiatan sosial, pembebanan dari aktivitas pengembangan sekolah non SDM, pembebanan dari aktivitas pengembangan sekolah SDM, pembebanan dari aktivitas administrasi sekolah, dan pembebanan

dari aktivitas manajemen sekolah. Berikut ini rincian biaya pengelolaan aktivitas kesiswaan hasil identifikasi RKAS SMK Swasta Tarbiyah Islamiyah Hampan Perak.

Tabel 4.17 Rekapitulasi Biaya Pengelolaan Aktivitas Kesiswaan

No	Rincian	Jumlah Dibebankan
1	Penyusunan Program kesiswaan	Rp. 4.000.000
2	Ekstrakurikuler	Rp. 72.000.000
3	Kegiatan Wisuda dan Perpisahan	Rp. 55.800.000
4	Kegiatan study Banding	Rp. 100.000.000
5	Bantuan Siswa Miskin	Rp. 60.000.000
Jumlah		Rp. 291.800.000

Sumber: Data SMK Swasta Tarbiyah Islamiyah Hampan Perak (2019)

C. Pembahasan

Dalam perhitungan Biaya Satuan (*Unit Cost*) Pendidikan di SMK Swasta Tarbiyah Islamiyah Hampan Perak, aktivitas yang ada di sekolah dibagi menjadi tujuh jenis, yaitu aktivitas pengembangan sekolah non SDM, aktivitas pengembangan sekolah SDM, aktivitas administrasi sekolah, aktivitas manajemen sekolah, aktivitas pengelolaan sarana dan prasarana, aktivitas belajar mengajar, dan aktivitas kesiswaan. Ketujuh aktivitas tersebut kemudian dikelompokkan dalam tiga golongan aktivitas, yaitu *Support Activities*, *Result Contributing Activities*, dan *Result Producing Activities*. *Support activities* terdiri dari aktivitas pengembangan sekolah non SDM, aktivitas pengembangan sekolah SDM, dan aktivitas administrasi sekolah. *Result contributing activities* terdiri dari aktivitas manajemen sekolah dan aktivitas pengelolaan sarana prasarana. *Result producing activities* terdiri dari aktivitas belajar mengajar dan aktivitas kesiswaan.

Berdasarkan perhitungan pembebanan biaya ke aktivitas yang telah dilakukan, besarnya dana yang dialokasikan ke aktivitas adalah sebagai berikut:

Tabel 4.18 Rekapitulasi Pembebanan Biaya ke Aktivitas

No	Aktivitas	Jumlah Biaya	Persentase
1	Pengembangan Sekolah Non SDM	Rp. 90.000.000	2,83%
2	Pengembangan Sekolah SDM	Rp. 298.412.000	9,27%
3	Administrasi Sekolah	Rp. 292.800.000	9,12%
4	Manajemen Sekolah	Rp. 44.900.000	1,40%
5	Pengelolaan Sarana Prasarana	Rp. 145.000.000	4,52%
6	Belajar Mengajar	Rp. 2.046.870.000	63,77%
7	Kesiswaan	Rp. 291.800.000	9,09%
Jumlah Biaya Aktivitas		Rp. 3.209.782.000	100%

Sumber: Data SMK Swasta Tarbiyah Islamiyah Hamparan Perak (2019)

Apabila dihitung secara persentase, alokasi dana untuk aktivitas belajar mengajar sebesar Rp. 2.046.870.000 (63,77%), aktivitas kesiswaan sebesar Rp. 291.800.000 (9,09%), aktivitas pengembangan sekolah non SDM sebesar Rp. 90.000.000 (2,83%), aktivitas pengembangan sekolah SDM sebesar Rp. 298.412.000 (9,27%), aktivitas administrasi sekolah sebesar Rp. 292.800.000 (9,12%), aktivitas manajemen sekolah sebesar Rp. 44.900.000 (1,40%), dan aktivitas pengelolaan sarana prasarana sebesar Rp.145.000.000 (4,52%).

Diketahui bahwa aktivitas belajar mengajar membutuhkan alokasi dana terbesar. Hal tersebut dikarenakan aktivitas belajar mengajar merupakan aktivitas paling utama di sekolah. Perbedaan jumlah alokasi dana yang dikonsumsi aktivitas belajar sangat signifikan dibandingkan dengan aktivitas lain. Aktivitas manajemen sekolah mengonsumsi dana dengan persentase terkecil. Hal tersebut berarti pengembangan manajemen sekolah tidak membutuhkan banyak dana. Hasil perhitungan pembebanan inilah yang akan digunakan untuk menghitung Biaya Satuan Pendidikan per siswa. Berdasarkan informasi yang diperoleh SPP

sekolah yang ditetapkan kepada seluruh siswa yakni Rp. 130.000,00 untuk siswa kelas X dan XI dan Rp. 210.000,00 untuk kelas XII.

Berdasarkan perhitungan Biaya Satuan Pendidikan dengan *Activity Based Costing* diperoleh hasil sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Biaya yang dibebankan} &= \text{Rp. } 3.209.782.000 - \text{Rp. } 1.632.400.000 \\ &= \text{Rp. } 1.577.382.000 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Biaya per siswa per tahun} &= \frac{\text{Jumlah Biaya}}{\text{Jumlah Siswa}} \\ &= \frac{\text{Rp. } 1.577.382.000}{1166 \text{ orang}} \\ &= \text{Rp. } 1.352.814,751 / \text{orang} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Biaya per siswa per bulan} &= \text{Rp. } 1.352.814,751 / 12 \\ &= \text{Rp. } 112.734,56 / \text{orang} \end{aligned}$$

Perhitungan di atas diperoleh dengan menjumlahkan seluruh jumlah biaya yang digolongkan berdasarkan aktivitas-aktivitas yang terjadi dan dikurangi dengan biaya BOSNAS (Bantuan Operasional Sekolah Nasional) yang diterima oleh sekolah. Peraturan pemerintah terkait BOSNAS tercantum dalam Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah. BOSNAS yang diterima pihak sekolah yang dikelola langsung oleh pihak Yayasan Pendidikan Tarbiyah Islamiyah dipergunakan untuk pengadaan barang dan jasa dan pembangunan serta pemeliharaan gedung yang biaya-biaya tersebut memerlukan biaya yang sangat besar, sehingga Yayasan Pendidikan Tarbiyah Islamiyah memberikan kebijakan untuk mengelola hal tersebut yang nantinya akan diakumulasi dengan BOSNAS

yang diterima Yayasan dari jenjang lainnya, karena mengingat untuk pemeliharaan dan pembangunan gedung yang digunakan secara bersama untuk semua siswa di seluruh jenjang yang ada di Yayasan Pendidikan Tarbiyah Islamiyah.

Dari hasil perolehan biaya berdasarkan *Activity Based Costing* maka terdapat selisih perhitungan antara biaya Satuan yang sudah diterapkan di sekolah dengan perhitungan berdasarkan *Activity Based Costing*. Biaya yang sudah diterapkan sekolah sebesar Rp. 130.000,00 untuk siswa kelas X dan XI dan Rp. 210.000,00 untuk kelas XII, sementara perolehan berdasarkan *Activity Based Costing* sebesar Rp. 112.734,56/siswa. Terdapat selisih sebesar Rp. 17.265,44/siswa (Rp. 130.000-Rp.112.734,56) untuk kelas X dan XI dan selisih sebesar Rp. 97.265,44/siswa untuk kelas XII. Selisih Biaya Satuan Pendidikan yang dihitung menggunakan *Activity Based Costing* dan SPP yang sudah diterapkan oleh SMK Swasta Tarbiyah Islamiyah Hampanan Perak telah terjadi *overcosting*. Menurut Horngren, dkk (2018: 161) pemerataan biaya dapat menimbulkan *overcosting* dan *undercosting*. *Overcosting* artinya terjadi penetapan biaya yang terlalu tinggi sehingga sebuah produk atau jasa yang dihasilkan membutuhkan sumber daya yang lebih sedikit tetapi justru memiliki biaya per unit yang tinggi. *Undercosting* artinya terjadi penetapan biaya yang terlalu rendah sehingga biaya yang ditetapkan lebih rendah daripada sumber daya real yang dibutuhkan untuk memproduksi produk atau jasa. Perhitungan menggunakan *Activity Based Costing* dinilai lebih akurat karena pada dasarnya biaya pada suatu aktivitas yang lebih spesifik.

Dalam penentuan tariff biaya pendidikan bagi siswa yang telah diberlakukan oleh sekolah sebesar Rp. 130.000,00 untuk siswa kelas X dan XI serta Rp. 210.00,00 untuk siswa kelas XII dinilai cukup efektif. Hal ini dikarenakan perbedaan yang tidak terlalu signifikan antara perhitungan dengan metode *Activity Based Costing* dan uang sekolah yang sudah berlaku. Sekolah memiliki alasan tersendiri memberlakukan uang sekolah yang lebih dari perhitungan *Activity Based Costing*. Hal ini dikatakan oleh pihak sekolah yang menyisihkan kelebihan nilai *overcosting* tersebut sebagai tabungan yang diperlukan untuk keperluan tak terduga, seperti pemeliharaan peralatan bengkel, pembelian bahan-bahan praktek bagi siswa program studi Tata Kelola Kecantikan Kulit dan Rambut dan keperluan wisuda yang mengalami fluktuasi setiap tahunnya.

Disarankan kepada SMK Tarbiyah Islamiyah Hambaran Perak untuk mempertimbangkan kembali penentuan tarif biaya pendidikan bagi siswa khususnya kelas XII yang cukup mengalami perbedaan yang signifikan. Disarankan untuk tidak terlalu menekan biaya pada siswa kelas XII karena mengingat keperluan pada siswa kelas XII lebih banyak dari kelas X dan XI seperti tabungan untuk mempersiapkan melanjutkan studi untuk mendaftar perguruan tinggi. Juga bagi siswa kelas X sebagai peserta didik baru, penentuan tarif biaya pendidikan yang efektif dan sesuai dengan metode *Activity Based Costing* mampu menarik minat konsumen di pasaran dan meningkatkan nilai jual SMK Tarbiyah Islamiyah Hambaran Perak, karena bagi masyarakat dengan biaya

yang rendah mampu mendapatkan kualitas pendidikan yang baik dengan fasilitas yang memadai dan kompetensi guru yang dapat diandalkan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa:

1. Penerapan perhitungan Biaya Satuan Pendidikan menggunakan *Activity Based Costing* dilakukan dengan cara sebagai berikut:
 - a. Mengidentifikasi aktivitas di SMK Swasta Tarbiyah Islamiyah Hampan Perak yang meliputi aktivitas belajar mengajar, aktivitas kesiswaan, aktivitas pengembangan sekolah non SDM, aktivitas pengembangan sekolah SDM, aktivitas administrasi sekolah, aktivitas manajemen sekolah, dan aktivitas pengelolaan sarana prasarana.
 - b. Mengumpulkan biaya yang terkumpul ke dalam aktivitas utama yaitu aktivitas belajar mengajar dan aktivitas kesiswaan. Pengelompokan didasarkan pada kesamaan *driver* masing-masing biaya, sehingga akan mempermudah perhitungan Biaya Satuan Pendidikan.
 - c. Menentukan *Unit Cost* Per Siswa Berdasarkan *Activity Based Costing*.
2. Terdapat perbedaan perhitungan SPP yang telah diterapkan dengan perhitungan menggunakan metode *Activity Based Costing* di SMK Swasta Tarbiyah Islamiyah Hampan Perak sehingga terjadi *overcosting* yakni 17.265,44/siswa (Rp. 130.000-Rp.112.734,56) untuk kelas X dan XI dan selisih sebesar Rp. 97.265,44/siswa untuk kelas XII.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang diperoleh, maka peneliti memberikan saran kepada beberapa pihak, antara lain:

1. Bagi SMK Swasta Tarbiyah Islamiyah Hamparan Perak
 - a. Hasil perhitungan diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan penentuan iuran pendidikan siswa.
 - b. Sekolah dapat membebaskan iuran pendidikan kepada orangtua siswa dengan jumlah yang berbeda-beda agar tidak terjadi *overcosting*.

2. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan pertimbangan bagi pemerintah dalam menentukan Bantuan Operasional Sekolah bagi siswa sesuai tingkat dan kompetensi keahlian.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

- a. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat menghitung Biaya Satuan Pendidikan per sumber dana. Misalnya Biaya Satuan Pendidikan yang bersumber dari pemerintah dan Biaya Satuan Pendidikan yang bersumber dari orangtua siswa, sehingga dapat diketahui masing-masing biaya yang dibebankan pada pemerintah dan orangtua siswa.
- b. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat menghitung pembebanan biaya pengembangan sekolah dan pembelian aset tetap sesuai dengan masa manfaatnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Agus Widarsono. (2010). Analisis Perhitungan Tarif Biaya Penyelenggaraan Pendidikan Dan Implikasi Terhadap Pendapatan SPP Sekolah (Studi Kasus Pada SMK XXX Kota Serang). ISSN:2338-1500
- Amirin. T. M, Darmodjo, H. & Jenry, K. (2013). *Manajemen Pendidikan*. Yogyakarta: UNY Press.
- Bastian, I. (2015). *Akuntansi Pendidikan*, Jakarta: Erlangga.
- Carter, W. K. (2009). *Akuntansi Biaya*. Jakarta: Salemba Empat.
- Dhania Anggarani Putri . (2011). *Analisis Penggunaan Metode Activity Based Costing Sebagai Alternatif Dalam Menentukan Tarif SPP SMP-SMA Pada YPI Nasima Semarang Tahun 2010*. Vol 1. No. 1
- Fattah, N. (2009). *Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Fattah, N. (2012). *Standar Pembiayaan Pendidikan*. Bandung : PT RemajaRosdakarya
- Femala. (2012). *Akuntansi Biaya*. Jakarta: Salemba Empat.
- Firdaus, A.D dan Wasilah A. (2012). *Akuntansi Biaya*. Jakarta: Salemba Empat.
- Ghozali, I. (2013). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21 Update PLS Regresi*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hasan, I. (2012). *Pokok-Pokok Materi Statistik I (Statistik Deskriptif)*. Jakarta: Bumi Aksara
- Horngren, C.T., dkk. (2018). *Akuntansi Biaya Jilid 1*. Jakarta: PT Gelora Aksara Pratama.
- Horngren, C.T., dkk (2016). *Akuntansi, Edisi ke-6*. Jakarta: PT Indeks Kelompok Gramedia

- Marzuki, I. (2012). *Metodologi penelitian kuantitatif*. CV. Pustaka Setia
- Matin. (2013). *Perencanaan Pendidikan : Perspektif Proses dan teknik dalam Penyusunan Rencana Pendidikan*. Jakarta: PT Rajawali Pers.
- Mulyadi. (2010). *Akuntansi Biaya*. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Mulyono. (2010). *Konsep Pembiayaan*. Jakarta: Ar-Ruzz Media.
- Nurhayati. (2010). *Satuan Biaya Pendidikan Dasar dan Menengah*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya
- Ria Maya Andreti. (2016). *Analisis Perhitungan Biaya Satuan (Unit Cost) Dengan Model Activity Based Costing (ABC) Di Smk Negeri 1 Wonosari*. Vol.1. No.3
- Sagala, S. (2014). *Manajemen Berbasis Sekolah dan Masyarakat: Strategi Memenangkan Persaingan Mutu*. Jakarta: PT. Nimas Multima.
- Sahertian, A.P. (2014). *Profil Pendidik Profesional*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Sugiyono. (2011). *Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Suhardan, D, Riduwan & Enas. (2012). *Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.
- Suharsaputra, U. (2010). *Administrasi Pendidikan*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Suharsaputra, U. (2013). *Administrasi pendidikan*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Supriadi, D. (2010). *Satuan Biaya Pendidikan Dasar dan Menengah*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Wardiman, D. (1998). *Pengembangan Sumberdaya Manusia Melalui Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)*. Jakarta: Jayakarta Agung Offset.

Jurnal

- Arnita, V., & Aulia, A. (2020). Prekdisi Pertumbuhan Laba Dalam Rasio Keuangan Pada PT JAPFA COMFEED TBK. *Jurnal Akuntansi Bisnis Dan Publik*, 11(1), 115-122.
- Barus, M. D. B., & Azzahra, A. S. (2020). Analisis Aplikasi Dan Penerapan Matematika Pada Ilmu Ekonomi Fungsi Permintaan Dan Penawaran. *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik*, 11(1), 103-114.
- Barus, M. D. B., & Hakim, A. (2020). Analisis Kemampuan Pemecahan Masalah Matematika melalui Metode *Practice Rehearsal Pairs* pada Siswa SMA Al-Hidayah Medan. *Biormatika: Jurnal ilmiah fakultas keguruan dan ilmu pendidikan*, 6(1), 74-78.
- Chrisna, H. (2019). Pengaruh Perilaku Belajar, Pengendalian Diri, Motivasi, Empati, Keterampilan, Dan Kepercayaan Diri Terhadap Prestasi Akademik Mahasiswa Prodi Akuntansi Universitas Pembangunan Panca Budi Medan. *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik*, 10(1), 87-100.
- Chrisna, H., Karin, A., & Hasibuan, H. A. (2020). Analisis Sistem Dan Prosedur Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) Dengan Akad Pembiayaan Murabahah Pada PT. BANK BRI Syariah Cabang Medan. *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik*, 11(1), 156-166.
- Dwilita, H., & Sari, P. B. (2020). Analisis Pengelolaan Keuangan Keluarga dan Literasi Keuangan Wanita di Dusun 20 Desa Klambir Lima Kebun. *Jurnal AKMAMI (Akuntansi Manajemen Ekonomi)*, 1(3), 184-197.
- Fadly, Y. (2019). Performa Mahasiswa Akuntansi Dalam Implementasi *English For Specific Purpose* (ESP) Di Universitas Pembangunan Panca Budi (UNPAB) MEDAN. *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik*, 9(2), 190-201.
- Hernawaty, H., Chrisna, H., & Junawan, J. (2020). Analisa Penggunaan *Forward Contract Hedging* pada Nilai Ekspor Barang Ekonomi Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal AKMAMI (Akuntansi Manajemen Ekonomi)*, 1(3), 95-109.
- Maisyarah, R. (2018). *Analysis of the Determinants Competition Oligopoly Market Telecommunication Industry in Indonesia*. *KnE Social Sciences*, 760-770.
- Nasution, A. P. (2018). Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja Dalam Meningkatkan Kinerja Pemerintah Daerah Dilingkungan Kecamatan Datuk Bandar Tanjung Balai. *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik*, 8(2), 15-25.

- Nasution, A. P. (2019). Implementasi *E-Budgeting* Sebagai Upaya Peningkatan Tranparansi Dan Akuntabilitas Pemerintah Daerah Kota Binjai. *Jurnal Akuntansi Bisnis Dan Publik*, 9(2), 1-13.
- Nasution, D. A. D. (2018). Analisis pengaruh pengelolaan keuangan daerah, akuntabilitas dan transparansi terhadap kinerja keuangan pemerintah. *Jurnal Studi Akuntansi & Keuangan*, 2(3), 149-162.
- Nasution, D. A. D. (2019, August). *The Effect of Implementation Islamic Values and Employee Work Discipline on The Performance of Moslem Religious Employees at Regional Financial Management in the North Sumatera Provincial Government. In International Halal Conference & Exhibition 2019 (IHCE) (Vol. 1, No. 1, pp. 1-7).*
- Purba, R. B. (2018). Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Transparansi Publik dan Aktivitas Pengendalian Terhadap Akuntabilitas Keuangan Pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tanah Datar. *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik*, 8(1), 99-111.
- Ritonga, M. (2018). Faktor Manajemen Biaya Dan Manajemen Pemasaran Terhadap Pendapatan Melalui Intensitas Produksi Pada Ukm Industri Rumahan Di Kota Binjai. *JUMANT*, 8(2), 68-78.
- Sari, M. N. (2020). Pengaruh *Return On Asset, Financial Leverage, Dan Trading Volume* Terhadap *Initial Return*. *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik*, 11(1), 18-27.
- Sari, P. B. (2020). Analisis Opini *Going Concern* Pada Perusahaan Farmasi di Bursa Efek Indonesia (*Multiple Correlation Method*). *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik*, 10(2), 189-196.
- Yunus, R. N. (2020). Analisis Multimodal Pada Iklan Layanan Masyarakat. *JUMANT*, 12(2), 83-89.

Undang-Undang:

Keputusan Mendikbud Nomor 0490/U/1990 tentang Pendidikan Menengah

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 37/PMK/.02/2012 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2013

Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Sekolah Menengah Kejuruan

Peraturan Pemerintah (PP) No. 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan

Permendikbud Nomor 44 Tahun 2012 tentang Pungutan dan Sumbangan Biaya Pendidikan pada Satuan Pendidikan Dasar

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang sistem pendidikan Nasional
Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008